

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI

2024

Diksi



@KamiVokasi



Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi

www.vokasi.kemdikbud.go.id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

LAPORAN KINERJA

DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN VOKASI

2024

Diksi



@KamiVokasi



Direktorat Jenderal
Pendidikan Vokasi

www.vokasi.kemdikbud.go.id



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Kata Pengantar



Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan Kinerja ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran program beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2024. Sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, pada tahun 2024 ditetapkan 5 Sasaran Program dengan 8 Indikator Kinerja Program (IKP). Secara umum Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut antara lain terkait pelaksanaan teknis program, misalnya peserta pelatihan yang mengundurkan diri, keterlambatan penyampaian dokumen administrasi, kendala pada sistem yang mendukung pengadaan barang dan jasa, blokir anggaran, dan permasalahan teknis lainnya. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi pada tahun 2024 dapat

tersampaikan secara detail dan terstruktur. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi pada tahun 2024.

Jakarta, Januari 2025
Rt. Direktur Jenderal,

Tatang Muttaqin

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel.....	viii
Ikhtisar Eksekutif.....	ix
BAB I Pendahuluan	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi.....	3
D. Isu-Isu Strategis/Permasalahan.....	6
E. Peran Strategis.....	7
BAB II Perencanaan Kinerja.....	8
A. Rencana Strategis	8
B. Matriks Kinerja.....	9
C. Program Prioritas	9
D. Rencana Kerja dan Anggaran.....	11
E. Perjanjian Kinerja	13
BAB III Akuntabilitas Kinerja	17
A. Capaian Kinerja.....	17
B. Realisasi Anggaran	76
C. Efisiensi Anggaran.....	77
D. Reformasi Birokrasi	77
E. Informasi Capaian Kinerja Lainnya yang mendukung	78
F. Inovasi	80
G. Penghargaan	82
H. Program <i>Crosscutting / Collaborative</i>	87
BAB IV Penutup	89
LAMPIRAN.....	92

Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.....	5
Gambar 2.1	Trend alokasi anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2020-2024 (dalam milyar)	11
Gambar 3.1	Trend Peningkatan Jumlah Mahasiswa Pendidikan Vokasi Tahun 2022-2024.....	19
Gambar 3.2	Trend Kenaikan Jumlah Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Vokasi (orang) ..	20
Gambar 3.3	Grafik Perbandingan Capaian 2023, Target 2024 dan Capaian 2024, dan Target Akhir Renstra.....	21
Gambar 3.4	Proses Pembangunan Gedung Laboratorium Penerima SBSN di Politeknik Negeri Padang.....	21
Gambar 3.5	Pengadaan Peralatan Penerima SBSN di Politeknik Negeri Lhokseumawe....	22
Gambar 3.6	Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan MBKM <i>Indonesian International Student Mobility Award</i> (IISMA) melalui BOPTN Insentif IKU di Politeknik Negeri Sambas.....	22
Gambar 3.7	Penggunaan Dukungan Layanan Operasional pada Kegiatan Peringatan Hari Mekatronika di Politeknik Negeri Ujung Pandang.....	22
Gambar 3.8	Trend Capaian Tahun 2022-2024 pada Seluruh IKP di SP 2	25
Gambar 3.9	Grafik Perbandingan Capaian 2023, Target 2024 dan Capaian 2024, dan Target Renstra	28
Gambar 3.10	Pembangunan Fisik dari Program SMK PK.....	29
Gambar 3.11	Pelaksanaan Kegiatan dari Program SMK PK.....	29
Gambar 3.12	Workshop pada Pelaksanaan Program SMK Berbasis Industri 4.0.....	29
Gambar 3.13	Workshop pada Pelaksanaan Program SMK <i>Teaching Factory</i>	30
Gambar 3.14	Grafik Perbandingan Capaian 2023, Target 2024 dan Capaian 2024, dan Target Akhir Renstra.....	36
Gambar 3.15	Ujicoba Peralatan dari Bantuan P3TV-PTS di STIKES Cendekia Medika	36
Gambar 3.16	Alat Pembuka Kelapa dari Bantuan <i>Competitive Fund</i> (CF) di Politeknik Negeri Ketapang.....	37
Gambar 3.17	Printer 3D dari Bantuan <i>Competitive Fund</i> (CF) di PPNS.....	37
Gambar 3.18	Kegiatan PKM berupa Penyaluran Alat Pengelola Sampah oleh Politeknik Negeri Cilacap	37
Gambar 3.19	Kegiatan POMN berupa Alat Pengering Batik oleh Politeknik Negeri Madiun	38
Gambar 3.20	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa di AKN Pacitan.....	38
Gambar 3.21	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa di Politeknik Negeri Banjarmasin	38
Gambar 3.22	Pelaksanaan Bimtek SPMI	39

Gambar 3.23	Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Industri melalui Sosialisasi Permendikbudristek 53/2023 di Politeknik Negeri Ambon.....	39
Gambar 3.24	Trend jumlah Peserta Didik Program PKK dan PKW yang Memiliki Pekerjaan atau Berwirausaha pada Tahun 2020-2024	43
Gambar 3.25	Grafik Perbandingan Capaian 2023, Target 2024 dan Capaian 2024, dan Target Akhir Renstra.....	45
Gambar 3.26	Program PKK pada Bidang Keahlian Kapal Pesiar	45
Gambar 3.27	Program PKK pada Bidang Keahlian Pijat Refleksi.....	45
Gambar 3.28	Program PKK pada Bidang Keahlian Perhotelan	46
Gambar 3.29	Program PKW pada Bidang Keahlian <i>Pastry and Bakery</i>	46
Gambar 3.30	Grafik Perbandingan Capaian 2023, Target 2024 dan Capaian 2024, dan Target Akhir Renstra.....	50
Gambar 3.31	Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BT Batik Trust dan Satuan Pendidikan.....	50
Gambar 3.32	Pelaksanaan <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> Pendidik Pelatihan Pengukur Kecepatan Motor di BBPPMPV BMTI.....	51
Gambar 3.33	Pelaksanaan <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> Pendidik Pelatihan Sistem Informasi Geografis di BBPPMPV BMTI	51
Gambar 3.34	Pelaksanaan <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> Instruktur Kursus dan Pelatihan Perikanan di BBPPMPV Pertanian.....	51
Gambar 3.35	Grafik Trend capaian 2022-2024	56
Gambar 3.36	Grafik Perbandingan Capaian 2023, Target 2024 dan Capaian 2024, dan Target Akhir Renstra.....	58
Gambar 3.37	Ujicoba Alat Hasil dari Bantuan Inovokasi di PPNS.....	58
Gambar 3.38	Alat Hasil dari Program MF di Politeknik Negeri Semarang.....	59
Gambar 3.39	Penelitian Kerjasama pada Program A3 Tematik	59
Gambar 3.40	Alat Hasil dari Program MF di PENS.....	59
Gambar 3.41	Seminar Hasil pada Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.....	60
Gambar 3.42	Capaian Nilai SAKIP Tahun 2022-2024	63
Gambar 3.43	Grafik Perbandingan Nilai Angka SAKIP Ditjen Vokasi Tahun 2022-2024	64
Gambar 3.44	Asistensi SAKIP di Politeknik Negeri Samarinda.....	66
Gambar 3.45	Asistensi SAKIP di Politeknik Negeri Bengkalis.....	67
Gambar 3.46	Pengukuran Kinerja Triwulan II Ditjen Pendidikan Vokasi	67
Gambar 3.47	Masa Sanggah Nilai Evaluasi Sakip sementara bersama Itjen	67
Gambar 3.48	Grafik Trend Capaian tahun 2022 - 2024	70
Gambar 3.49	Grafik Perbandingan Capaian 2023, Target dan Capaian 2024, dan Target Akhir Renstra.....	72
Gambar 3.50	Pendampingan Pelaksanaan ZI di Politeknik Negeri Ujung Pandang.....	73
Gambar 3.51	Pendampingan Pelaksanaan ZI di Politeknik Negeri Bali	73
Gambar 3.52	Aplikasi Sistem Informasi Data dan Capaian Kinerja PT Vokasi (SIDAKIN)	80

Gambar 3.53	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kerjasama (SIKERMA)	81
Gambar 3.54	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan <i>Gold Winner</i> Kategori <i>Press Gathering</i> dan <i>Silver Winner</i> Kategori <i>Press Release</i> pada ajang <i>Media Relations Awards</i>	82
Gambar 3.55	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan <i>Gold Winner</i> Kategori PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Subkategori PPID Pelaksana dan <i>Silver Winner</i> Kategori Program Kehumasan Pemerintah Subkategori Kementerian pada ajang Anugerah Humas Indonesia	82
Gambar 3.56	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan <i>Gold Winner</i> Kategori <i>Owned Media Subkategori E-Magazine</i> pada ajang <i>Public Relations Indonesia Awards</i>	83
Gambar 3.57	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan <i>Gold Winner</i> Kategori Media Sosial Pemerintah Terbaik pada ajang <i>Indonesia Digital Media Awards</i>	83
Gambar 3.58	BBPPMPV BMTI mendapatkan Predikat Satker WBBM dari KemenPAN RB ..	84
Gambar 3.59	Dit. Mitras DUDI mendapatkan Peringkat III Transaksi Digipay Satu Terbanyak dari KPPN Jakarta III	84
Gambar 3.60	BBPPMPV Pertanian mendapatkan Penghargaan sebagai Pembayar Pajak Terbaik dari Kanwil DJP Jawa Barat	84
Gambar 3.61	Dit. Kursus dan Pelatihan mendapatkan Peringkat II IKPA Terbaik dari KPPN Jakarta	85
Gambar 3.62	Politeknik Negeri Bali mendapatkan Peringkat I Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA BLU dari Kanwil DJPB Bali	85
Gambar 3.63	Politeknik Negeri Malang mendapatkan Peringkat I Berkinerja Terbaik Kategori BLU Triwulan III dari DJPB Kemenkeu	85
Gambar 3.64	Politeknik Negeri Malang mendapatkan Ranking 497 Dunia	86
Gambar 3.65	AKN Aceh Barat mendapatkan IKPA Sangat Baik Semester I dari DJPB Kemenkeu	86
Gambar 3.66	Politeknik Negeri Batam mendapatkan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Pelayanan Prima dari KemenPAN RB	86

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	9
Tabel 2.2 Target dan Alokasi Anggaran Program Prioritas Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2024.....	10
Tabel 2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2024 (dalam ribuan).....	12
Tabel 2.4 Sasaran, Indikator dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	13
Tabel 2.5 PK Awal Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2024	14
Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Awal	14
Tabel 2.7 PK Revisi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2024.....	15
Tabel 2.8 Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Revisi.....	16
Tabel 3.1 Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2024	17
Tabel 3.2 APK Perguruan Tinggi Menurut Kuintil Pengeluaran per tahun	18
Tabel 3.3 Klasifikasi Predikat SAKIP.....	65
Tabel 3.4 Rincian Nilai pada masing-masing Komponen SAKIP	66
Tabel 3.5 Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM	71
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran per IKP (dalam ribuan)	77

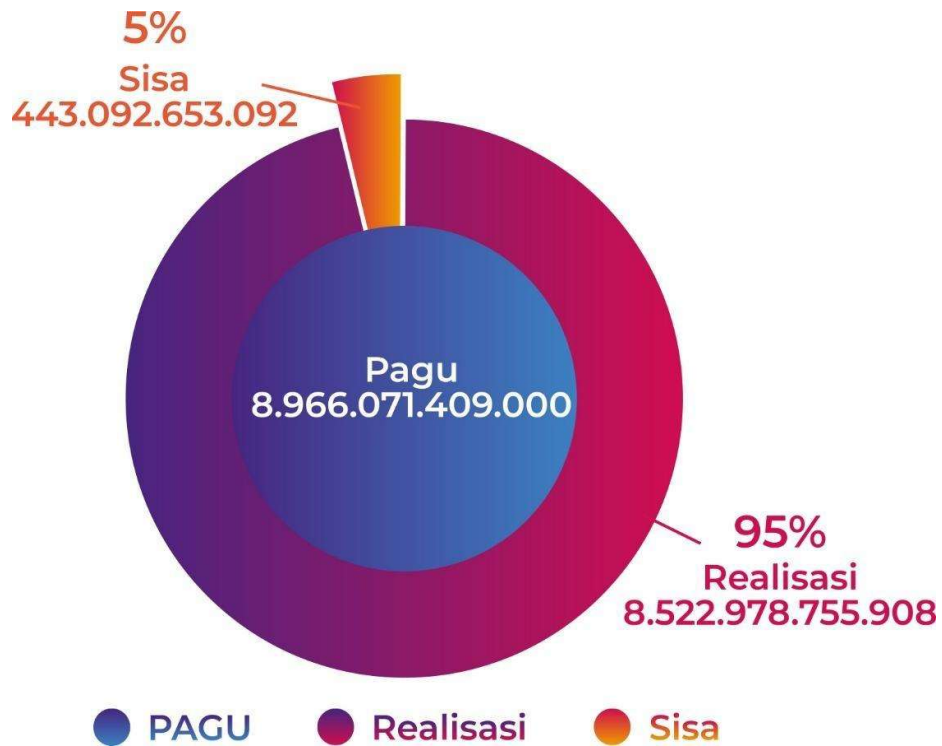
Ikhtisar Eksekutif

Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2024 menyajikan tingkat pencapaian 5 sasaran program dengan 8 indikator kinerja program sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Secara umum, capaian kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah sebagai berikut.



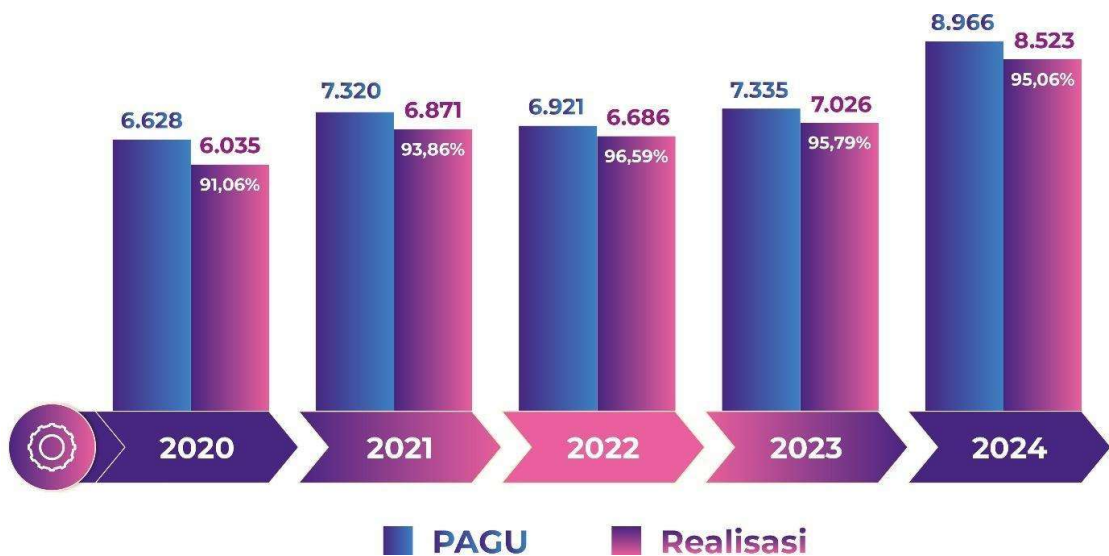
Grafik Trend Capaian IKP Tahun 2022-2024

Dari sisi anggaran, pada tahun 2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah menyerap anggaran sebesar Rp8.522.978.755.908,- atau 95% dari total pagu anggaran yaitu sebesar Rp8.966.071.409.000,-.



Grafik Realisasi Anggaran

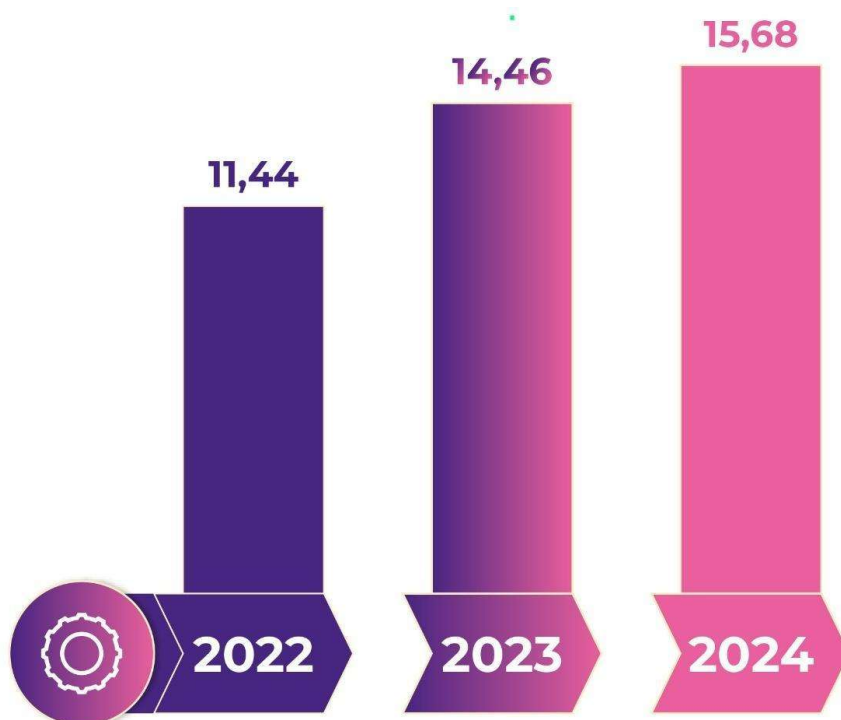
Berikut disajikan trend alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dari tahun 2020-2024.



Grafik Trend Alokasi Anggaran Tahun 2020-2024 (Dalam Milyar)

Sasaran Program 1

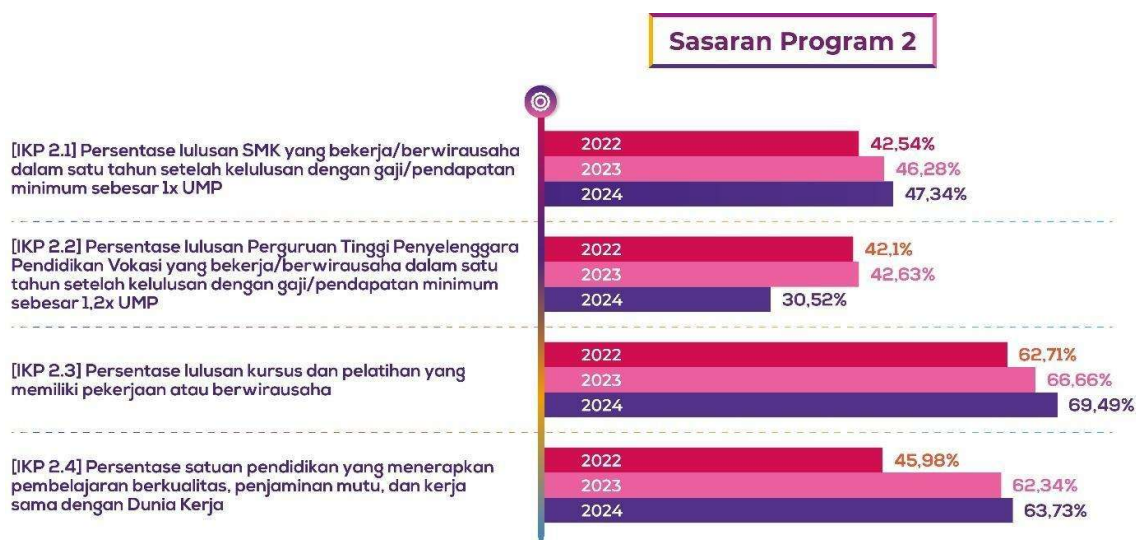
Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi.



Grafik Trend Capaian IKP 1 Tahun 2022-2024

Sasaran Program 2

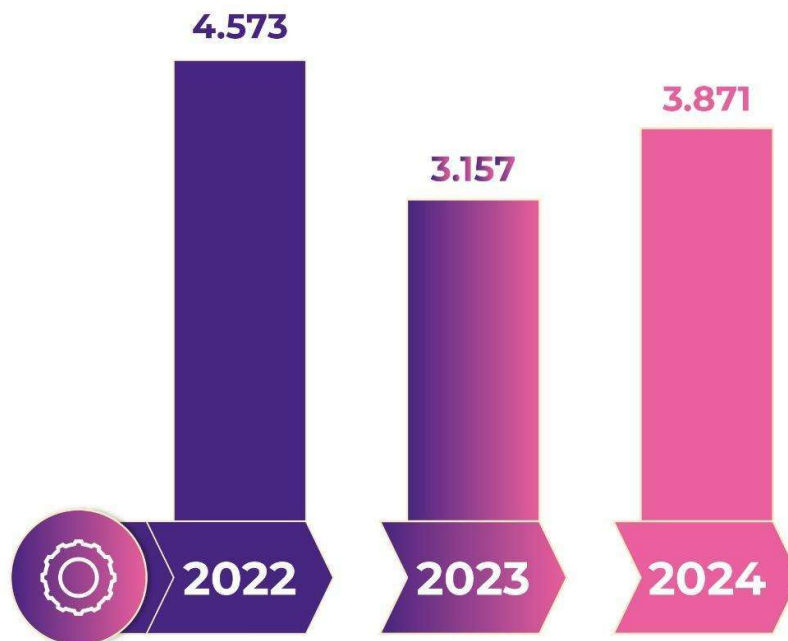
Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.



Grafik Trend Capaian IKP 2 Tahun 2022-2024

Sasaran Program 3

Meningkatnya riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi



Grafik Trend Capaian IKP 3 Tahun 2022-2024

Sasaran Program 4

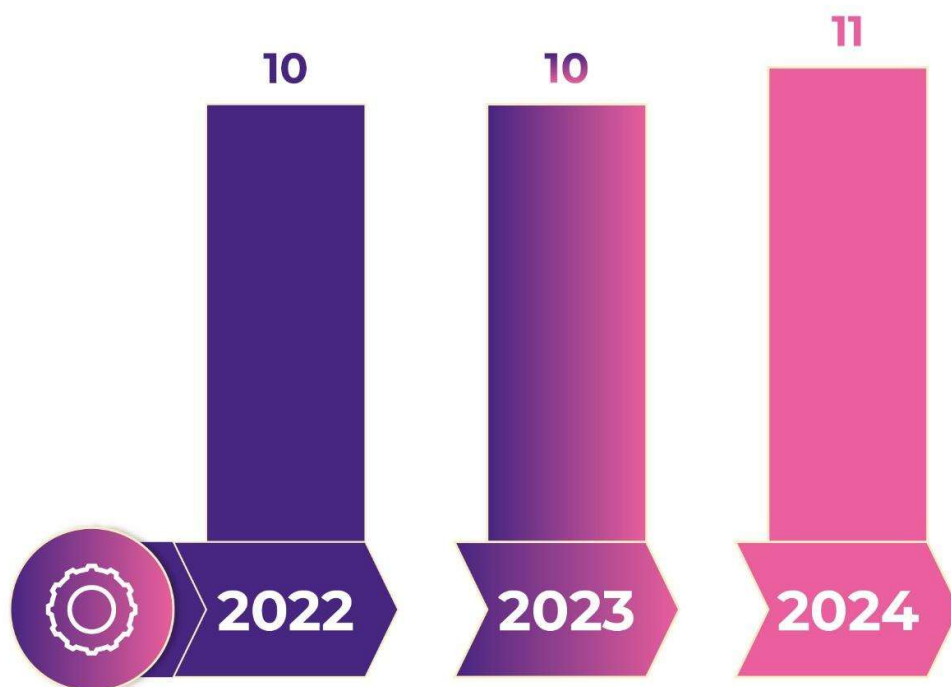
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.



Grafik Trend Capaian IKP 4 Tahun 2022-2024

Sasaran Program 5

Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek.



Grafik Trend Capaian IKP 5 Tahun 2022-2024

Selama tahun 2024, terdapat permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target, antara lain:

1. Adanya pemutusan kontrak di salah satu politeknik penerima SBSN karena kontraktor terkena sanksi daftar hitam.
2. Alat pembelajaran yang dibutuhkan sebagian besar adalah barang *import*. Untuk mensubstitusi dengan barang yang mengandung PDN/TKDN diperlukan proses identifikasi yang cukup lama, agar kualitas dan spesifikasi tetap sesuai dengan yang diharapkan.
3. Dalam pelaksanaan program SMK PK perlu dilakukan kurasi melalui verifikasi dan validasi lebih mendetail terhadap komponen kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap bentuk nilai padanan yang akan diberikan oleh mitra industri, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama pada saat proses seleksi sekolah calon penerima program bantuan.
4. Peringkat akreditasi perguruan tinggi masih banyak yang di bawah B dan belum menerapkan penjaminan mutu berbasis *outcome*, sehingga sulit untuk diusulkan ke akreditasi internasional.

5. Terdapat beberapa lembaga kursus dan pelatihan yang sudah ditetapkan sebagai calon penyelenggara program PKK dan PKW namun terlambat menyampaikan laporan awal sehingga menunda proses pencairan dana bantuan.
6. Pada pelaksanaan pelatihan untuk guru SMK terdapat irisan kompetensi pada peserta sehingga perlu dilakukan pemetaan ulang, dan pada pelaksanaan pelatihan untuk pengawas SMK terjadi kekurangan peserta karena untuk wilayah Papua jumlah pengawas SMK sangat sedikit dan beberapa belum dilantik.
7. Jumlah usul proposal penelitian pada program penelitian dan pengabdian masyarakat belum terlalu banyak, disebabkan pengusul membutuhkan waktu untuk melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai riset yang akan dilakukan, serta diperlukan waktu untuk menyepakati dokumen kerjasama kegiatan antar kampus/lembaga.
8. Adanya penambahan indikator Zona Integritas (ZI) pada Perjanjian Kinerja Direktur Politeknik/AKN sehingga perlu disusun formula dan definisi operasional terkait ZI pada Renstra Politeknik/AKN.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan tim pokja SBSN untuk penunjukan langsung ke pemenang cadangan.
2. Melakukan identifikasi PDN/TKDN yang memiliki kualitas dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
3. Pelibatan berbagai pihak (praktisi, akademisi) untuk membantu pelaksanaan kurasi kegiatan padanan dari mitra industri untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
4. Mendorong perguruan tinggi negeri vokasi untuk meningkatkan kualitas/mutu melalui pendampingan persiapan akreditasi.
5. Melakukan pendampingan kepada lembaga kursus dan pelatihan yang sudah ditetapkan sebagai calon penyelenggara program PKK dan PKW namun belum mengunci laporan awal.
6. Melakukan pemanggilan peserta pelatihan *upskilling* dan *reskilling* untuk pendidik dan tenaga kependidikan angkatan berikutnya untuk menutupi kekurangan pada angkatan yang sedang berjalan, sementara dilakukan pemetaan peserta cadangan dan mengganti pelatihan pengawas SMK dengan pelatihan peningkatan kapabilitas kepala sekolah.

- 
7. Menerapkan relaksasi waktu pemenuhan persyaratan pada dokumen kerja sama bersama mitra PT LN saat pendaftaran program penelitian dan pengabdian masyarakat, dimana dapat disampaikan tanpa mencantumkan kontribusi dana padanan, tetapi wajib dipenuhi apabila proposal telah ditetapkan menjadi penerima dana.
 8. Menyusun formula dan definisi Indikator ZI dan mensosialisasikan kepada satuan kerja untuk kemudian dimuat ke renstra revisi politeknik/AKN.

BAB I

Pendahuluan



Gambaran Umum

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Tahun 2020-2024 yang merupakan turunan dari Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024. Salah satu prioritas nasional pada pembangunan periode tahun 2020-2024 adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga terwujud SDM Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan mandat menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi terus melakukan inovasi dan berupaya agar dapat menghasilkan SDM Vokasi yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan di masa yang akan datang, yaitu memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila, selaras dengan visi yaitu menciptakan pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi pertama kali dibentuk tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 2020 sampai dengan 31 Mei 2022 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dipimpin oleh Bapak Wikan Sakarinto, kemudian pada bulan Juni 2022 pelaksana tugas oleh Ibu Suharti. Pada 31 Juni 2022 sampai dengan 31 Juli 2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dipimpin oleh Ibu Kiki Yuliati, dan dari 31 Juli 2024 hingga saat ini oleh Bapak Tatang Muttaqin. Jumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah sebanyak 19.828 orang.

Dasar Hukum



Sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berkewajiban menyampaikan laporan kinerja atas penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat yang berlandaskan asas akuntabilitas dan dasar hukum sebagai berikut:

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024.
- 4 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 5 Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
- 6 Peraturan Menteri Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2020-2024.
- 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 11 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.
- 12 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut,

Tugas:

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan vokasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.

Fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi vokasi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
3. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
4. penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
5. pelaksanaan kebijakan di bidang standar dan penjaminan mutu peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
6. pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, kemahasiswaan, kelembagaan, dan sumber daya pada pendidikan tinggi vokasi.
7. pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi vokasi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
8. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan kompetensi vokasional dosen vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan tinggi vokasi.
9. pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru dan dosen vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi.
10. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peserta didik,

pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola, dan penilaian pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.

11. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan kompetensi vokasional guru vokasi, pendidik vokasi lainnya, dan tenaga kependidikan vokasi pada pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
12. pelaksanaan kemitraan dan penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri.
13. perumusan pemberian izin penyelenggaraan satuan pendidikan kejuruan dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan perwakilan negara asing atau lembaga asing serta perguruan tinggi vokasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perwakilan negara asing atau lembaga asing.
14. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan vokasi, pendidikan kejuruan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.
15. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sebagai penjabaran Peraturan Presiden tersebut, dan untuk memastikan seluruh tugas dan fungsi terdistribusikan dengan baik, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Sesuai Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tersebut, Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI

(Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek)



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi



Isu Strategis

1

Secara absolut belum terlihat peningkatan yang signifikan terhadap pertumbuhan APK jumlah mahasiswa pendidikan tinggi vokasi, hal ini seiring dengan peningkatan APK Pendidikan Tinggi yang tidak terlalu signifikan.

2

Secara umum terdapat peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Vokasi Negeri dibanding tahun sebelumnya, meskipun masih terdapat beberapa IKU yang belum berhasil dicapai pada beberapa Perguruan Tinggi Vokasi Negeri.

3

Kebekerjaan lulusan pendidikan tinggi vokasi masih terkendala dengan upah dimana peningkatan upah lulusan satu tahun setelah kelulusan tidak sebanding dengan peningkatan UMP *fresh graduate*, apalagi indikator keberhasilannya adalah lulusan baru dengan upah 1,2 kali UMP.

4

Terdapat tren peningkatan lulusan kursus dan pelatihan yang mendapatkan pekerjaan satu tahun setelah kelulusan, namun belum ada instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur keberlanjutan lulusan dalam suatu pekerjaan dan tren pendapatan lulusan.

5

Sebaran satuan pendidikan vokasi yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu dan kerja sama dengan industri belum tersebar secara merata karena terbatasnya satuan pendidikan yang mengajukan proposal di wilayah-wilayah tertentu.

6

Peningkatan jumlah satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM belum seimbang dengan target per tahun yang ditetapkan pada indikator rencana strategis Ditjen Pendidikan Vokasi.

Peran Strategis



1

Berperan dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah melalui Sekolah Menengah Kejuruan dan APK Perguruan Tinggi melalui Perguruan Tinggi Vokasi.

2

Berperan dalam peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Vokasi Negeri.

3

Berperan dalam pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan vokasi dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan dan peningkatan jumlah lulusan yang bekerja/berwirausaha satu tahun setelah kelulusan.

4

Berperan dalam peningkatan jumlah lulusan Kursus dan Pelatihan yang mendapatkan pekerjaan/berwirausaha satu tahun setelah kelulusan.

5

Berperan dalam meningkatkan jumlah satuan pendidikan vokasi yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu dan kerja sama dengan industri.

6

Berperan mendampingi Perguruan Tinggi Vokasi untuk meningkatkan jumlah keluaran penelitian PT vokasi yang diterapkan oleh masyarakat.

7

Berperan dalam mendorong keterlibatan DUDI dalam peningkatan kompetensi peserta didik pendidikan vokasi serta memfasilitasi praktek kerja lapangan atau magang industri untuk peserta didik maupun pendidik untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan standar DUDI.

8

Berperan dalam meningkatkan jumlah Perguruan Tinggi Vokasi yang terakreditasi A atau Unggul.

9

Berperan dalam meningkatkan jumlah Perguruan Tinggi Vokasi Negeri menjadi Badan Layanan Umum (BLU).

BAB II Perencanaan Kinerja



Visi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung Visi dan Misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif.



Misi

- Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
- Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
- Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Tujuan Strategi

- 1 Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.
- 2 Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik yang berkarakter.
- 3 Peningkatan produktivitas, riset, inovasi, dan ilmu pengetahuan perguruan tinggi.
- 4 Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

B. Matriks Kinerja

Pada tahun 2022 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah melakukan penyusunan revisi renstra tahun 2020-2024 yang merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Tujuan penyusunan revisi Renstra Ditjen Pendidikan Vokasi adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Melalui revisi renstra 2020-2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melakukan penyesuaian Rencana Kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Program/Indikator Kinerja Program

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program		Satuan	Baseline 2020	Target			
				2021	2022	2023	2024
SP 1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi						
IKP 1.1	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	7,93	7,93	12,95	15,47	17,98
SP 2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja						
IKP 2.1	Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	33,57	33,57	39,18	42,18	46,18
IKP 2.2	Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	31,15	31,15	44,37	47,37	50,37
IKP 2.3	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	46,74	46,74	53,37	56,69	60
IKP 2.4	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	12,31	12,31	50	55	60
SP 3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi						
IKP 3.1	Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	2.270	2.270	2.506	2.611	2.722
SP 4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi						
IKP 4.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	A	A	A	A
SP 5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek						
IKP 5.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM)	Satker	7	7	16	26	46

C. Program Prioritas

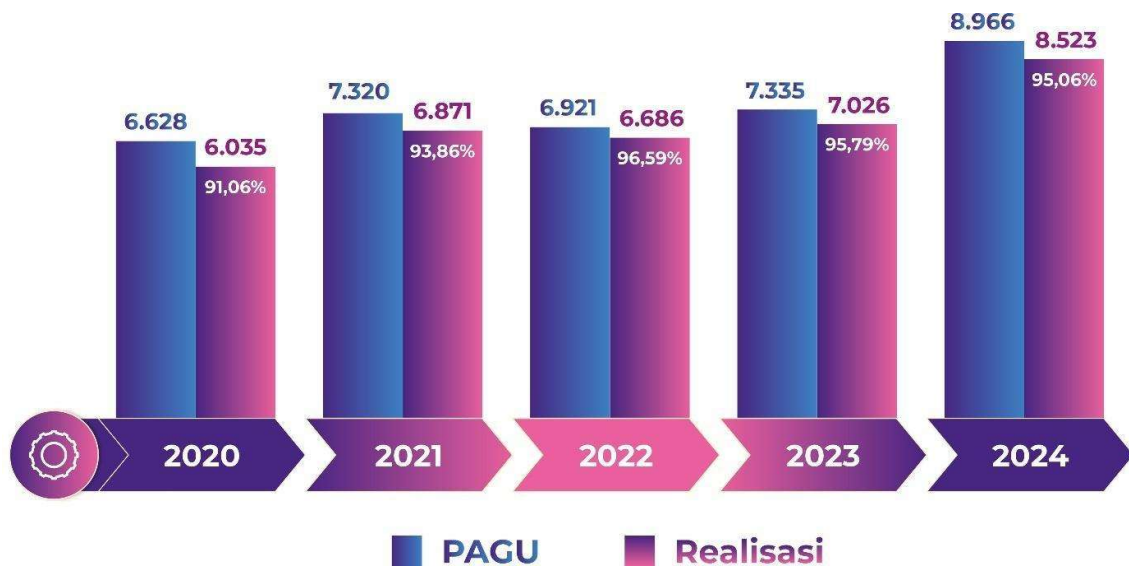
Pada tahun 2024 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengampu 27 program prioritas yang dilaksanakan di semua Direktorat, BB/BPPMPV, serta Politeknik dan AKN, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2 Target dan Alokasi Anggaran Program Prioritas Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Target 2024	Alokasi Anggaran 2024 (ribuan)
1	Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja	125.000	73.651.649
2	Siswa SMK yang Mendapatkan Penguatan Persiapan Program Magang Luar Negeri	3.200	52.235.680
3	SMK yang Dikembangkan Menjadi Pusat Keunggulan	1.340	1.118.932.440
4	SMK yang Melaksanakan Program UKS	72	3.705.800
5	SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan	240	14.090.000
6	SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0	63	72.212.500
7	SMK yang Mendapatkan Pendampingan Peningkatan Mutu	72	41.254.192
8	SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (<i>Teaching Factory</i>)	315	280.746.730
9	Kemitraan antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	300	53.976.844
10	Satuan Pendidikan Vokasi Yang Selaras Dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri	200	33.365.110
11	Kemitraan antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri	1	11.669.263
12	Lembaga Kursus dan Pelatihan Berstandar Industri	1.000	13.247.114
13	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja	51.939	227.489.230
14	Anak Usia Sekolah tidak Sekolah memperoleh Pendidikan Kecakapan Wirausaha	23.637	147.635.963
15	Sarana Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	38	217.406.555
16	Gedung Perguruan Tinggi Vokasi yang Direvitalisasi (SBSN)	14	484.007.541
17	Inovasi model pembelajaran vokasi mengacu pada dunia kerja	28	3.648.008
18	Satuan pendidikan vokasi yang bermitra dengan Dunia kerja	105	3.225.800
19	Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan Vokasi	5.306	35.512.856
20	Sarana Pendukung Pembelajaran (BB/BPPMPV)	770	80.826.275
21	Guru kejuruan yang mendapatkan pelatihan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan dunia kerja	3.899	19.506.162
22	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi yang mengikuti Upskilling dan Reskilling Berstandar Industri	12.403	307.410.529
23	Instruktur kursus yang mendapatkan pelatihan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan	330	5.661.634
24	Mahasiswa Pendidikan Tinggi Vokasi Yang Mengikuti Uji Kompetensi Profesi	15.000	4.520.161
25	Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri	138	84.800.000
26	SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi	900	32.341.594

D. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut trend alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2020-2024,



Gambar 2.1 Trend alokasi anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2020-2024
(dalam milyar)

Dari tahun 2020 ke tahun 2021 pagu anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi naik, namun pada tahun 2022 kembali turun. Kemudian pada tahun 2024 pagu anggaran naik cukup signifikan dibanding tahun 2023, dimana pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp7.335.000.000.000 naik menjadi Rp8.966.071.409.000 di tahun 2024.

Adapun rencana kerja dan anggaran tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi Tahun 2024
(dalam ribuan)

Kode	Nama Kegiatan	Target	Alokasi (Rp)
41	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi		353.758.676
41.06	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	17,98	
42	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja		1.497.705.285
42.01	Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	46,18	
42.02	Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	50,37	
42.03	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	60	
42.04	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	60	
43	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi		2.287.976.746
43.01	Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	2.722	
07	Tata Kelola Kementerian yang transparan dan akuntabel		2.533.983.435
07.11	Predikat SAKIP Ditjen Vokasi	A	
07.12	Jumlah Satker di Ditjen Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	46	
TOTAL			6.673.424.142

E. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan rencana strategis tahun 2020-2024 edisi revisi tahun 2022, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan sasaran, indikator dan target sebagai berikut.

Tabel 2.4 Sasaran, Indikator dan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Rencana Strategis	Target Perjanjian Kinerja
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	17,98	17,98
2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	1 Persentase lulusan SMK yang bekerja / berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	46,18	46,29
		2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	50,37	50,37
		3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	60	66,62
		4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	60	62,35
3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	2.722	3.158
4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	A
5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM)	Satker	46	46

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui perjanjian kinerja tahun 2024. Penetapan target perjanjian kinerja telah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian tahun-tahun sebelumnya, target rencana strategis, serta ketersediaan alokasi anggaran, yang dilakukan melalui reviu rencana strategis.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2024.

Tabel 2.5 PK Awal Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target Perjanjian Kinerja
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	1	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	17,98
2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	1	Persentase lulusan SMK yang bekerja / berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	46,29
		2	Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	50,37
		3	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	66,62
		4	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	62,35
3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	1	Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	3.158
4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A
5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM)	Satker	46

Tabel 2.6 Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Awal

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi (Rp)
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	2.599.684.330.000
2	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	1.656.828.991.000
3	4264	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	99.011.217.000
4	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	388.372.307.000
5	4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	453.758.676.000
6	4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	2.553.979.922.000
7	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	463.297.989.000
8	6700	Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi	274.363.263.000
9	6701	Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	124.532.043.000
TOTAL			8.613.828.738.000

Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mengalami revisi DIPA beberapa kali dengan penyesuaian di masing-masing kegiatan. Revisi dilakukan karena adanya penambahan anggaran belanja pegawai dan pemotongan perjalanan dinas. Penyesuaian alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja dari anggaran sebesar Rp.8.613.828.738.000 menjadi Rp.8.966.071.409.000.

Berikut ringkasan revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2024.

Tabel 2.7 PK Revisi Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target Perjanjian Kinerja
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	1	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	17,98
2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	1	Persentase lulusan SMK yang bekerja / berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	46,29
		2	Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	50,37
		3	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	66,62
		4	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	62,35
3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	1	Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	3.158
4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A
5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM)	Satker	46

Tabel 2.8 Alokasi Anggaran Perjanjian Kinerja Revisi

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi (Rp)
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	2.640.271.107.000
2	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	1.656.828.991.000
3	4264	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	99.011.217.000
4	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	388.372.307.000
5	4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	452.468.851.000
6	4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	2.838.495.508.000
7	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	463.636.528.000
8	6700	Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi	274.363.263.000
9	6701	Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	152.623.637.000
TOTAL			8.966.071.409.000

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan 4 sasaran dengan 8 indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2024.

Tabel 3.1 Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Realisasi 2024	%
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	1.1	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	17,98	15,68	87,21
2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	2.1	Persentase lulusan SMK yang bekerja / berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	46,29	47,34	102,27
		2.2	Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	50,37	30,52	60,59
		2.3	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	66,62	69,49	104,31
		2.4	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	62,35	63,73	102,21
3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	3.1	Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	3.158	4.257	134,80
4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	4.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	AA	112,5
5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	5.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM)	Satker	46	11	23,91

A. Capaian Kinerja

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan 5 (lima) Sasaran Program (SP) dengan 8 (delapan) Indikator Kinerja Program (IKP). Berikut ketercapaian SP dan IKP tersebut selama tahun 2024.

Sasaran Program 1. Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi

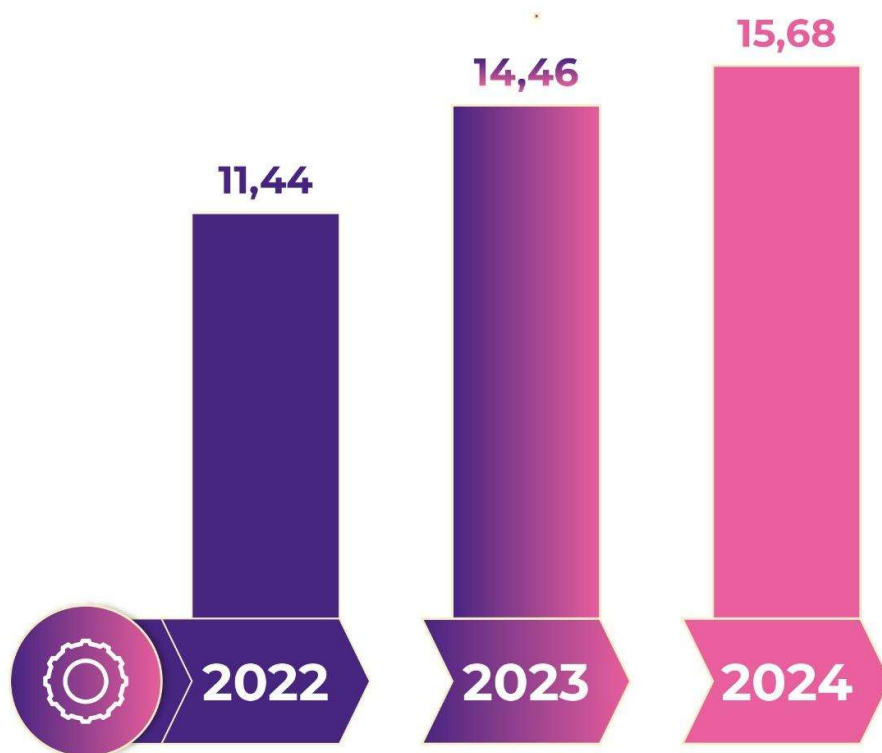
Berdasarkan hasil Susenas Kor Tahun 2024, Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi pada tahun 2024 adalah 32,00. Terdapat peningkatan sebesar 0,55 poin dibandingkan tahun sebelumnya dimana APK Perguruan Tinggi tahun 2023 adalah 31,45. Meskipun APK Perguruan Tinggi meningkat dari tahun ketahun, namun masih ada isu yang menarik terkait dengan partisipasi pada Perguruan Tinggi ini. Jika ditelusuri per kuintil, pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa APK yang dihasilkan

pada semua jenjang pendidikan tinggi untuk rumah tangga dengan kelompok pengeluaran 20 persen teratas (status ekonomi baik) menghasilkan nilai APK yang jauh lebih tinggi dibandingkan dua kelompok di bawahnya. Hal ini memang wajar terjadi, mengingat kemampuan ekonomi rumah tangga mampu menciptakan peluang bagi anggota rumah tangga untuk berpartisipasi dalam bidang pendidikan.

Tabel 3.2 APK Perguruan Tinggi Menurut Kuintil Pengeluaran per tahun

Kuintil Pengeluaran	Angka Partisipasi (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Kuintil Pengeluaran		
	2022	2023	2024
Kuintil 1	19,46	17,51	18,23
Kuintil 2	23,17	22,84	22,47
Kuintil 3	27,18	26,95	27,12
Kuintil 4	32,68	33,62	33,34
Kuintil 5	51,33	52,66	54,25
Indonesia	31,16	31,45	32,00

Jika ditelusuri dari tahun ke tahun, pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat tren peningkatan APK pada kelompok masyarakat dengan penghasilan tinggi yaitu kuintil 4 dan kuintil 5. Tentu saja dibutuhkan kebijakan-kebijakan tertentu untuk meningkatkan partisipasi pada pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh perguruan tinggi vokasi adalah meningkatkan proporsi mahasiswa dengan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 1 dan UKT 2. Dalam tiga tahun terakhir terdapat peningkatan proporsi mahasiswa pendidikan vokasi sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Gambar 3.1 Trend Peningkatan Jumlah Mahasiswa Pendidikan Vokasi Tahun 2022-2024

IKP 1.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi

Peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi menunjukkan upaya serius dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Semakin banyak mahasiswa pendidikan tinggi vokasi memberikan dampak semakin meningkatnya kualitas kehidupan bangsa dan masyarakat dimasa yang akan datang seiring laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang mendominasi peta demografi Indonesia, disamping tuntutan pasar kerja dan kebutuhan industri.

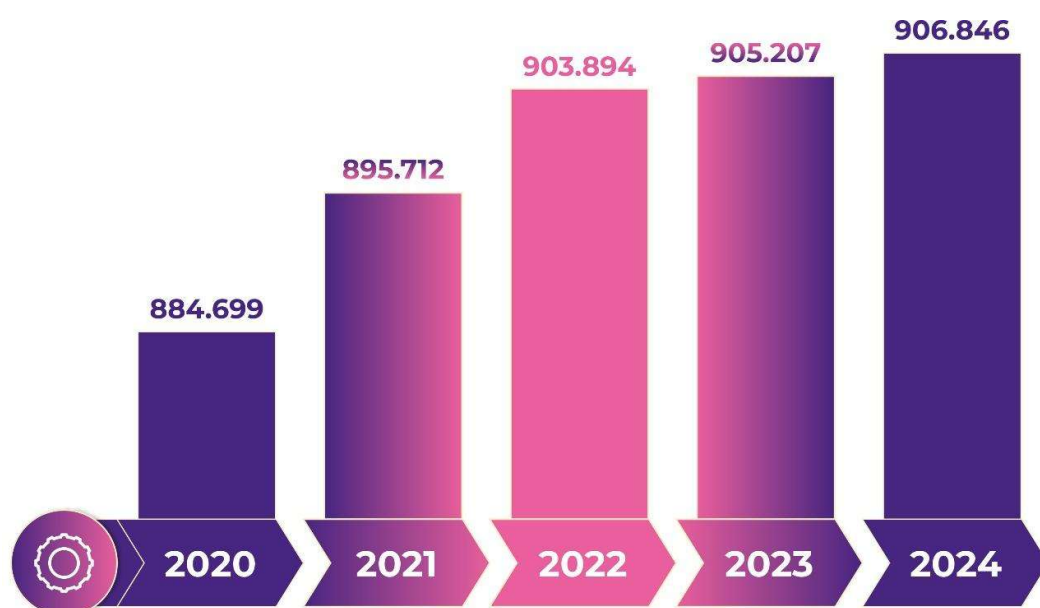
Mahasiswa perguruan tinggi vokasi adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi Vokasi D1 sampai dengan S3 Terapan baik yang berasal dari Politeknik, Akademi Komunitas dan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi (UNISTA).

Formula perhitungan untuk IKP 1.1 adalah menghitung jumlah total mahasiswa perguruan tinggi vokasi dibagi jumlah total mahasiswa perguruan tinggi kemudian dikalikan 100%. Satuan yang digunakan adalah % (persen) dengan metode perhitungan kumulatif.

$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{jumlah total mahasiswa pendidikan tinggi vokasi}}{\text{jumlah total mahasiswa pendidikan tinggi}} \times 100\%$$

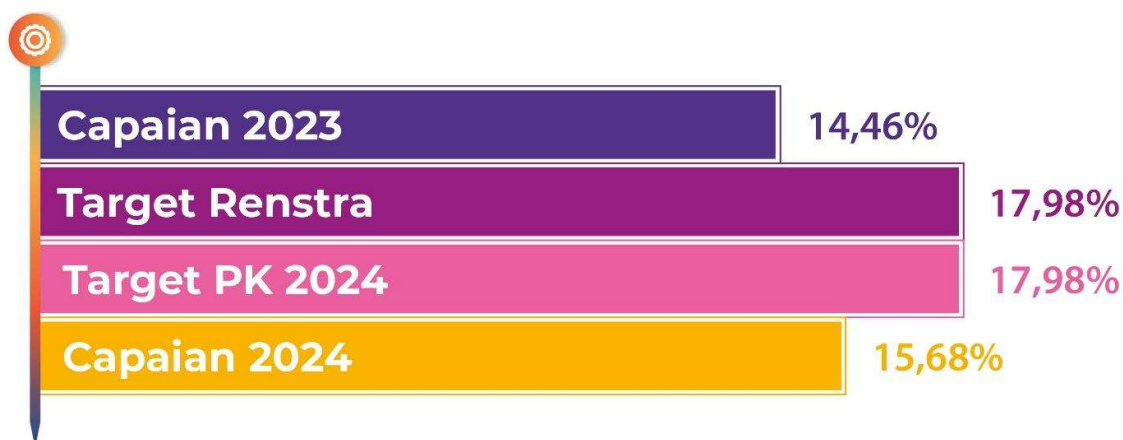
Indikator Kinerja Program	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	14,46	17,98	15,68	75,75	17,98	87,21

Capaian IKP 1.1 pada tahun 2024 diperoleh dari perhitungan jumlah total mahasiswa perguruan tinggi vokasi, yaitu sebanyak 507.351 orang dibagi dengan jumlah total mahasiswa perguruan tinggi sebanyak 3.236.002 orang, sehingga mendapatkan capaian sebesar 15,68%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yaitu sebesar 14,46%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 1,22%. Capaian ini pun belum memenuhi target yang ditetapkan pada akhir renstra tahun 2024 yaitu sebesar 17,98% atau baru mencapai 87,21%. Secara absolut peningkatan jumlah mahasiswa pendidikan tinggi vokasi dapat dilihat pada grafik di bawah ini



Gambar 3.2 Trend Kenaikan Jumlah Mahasiswa pada Perguruan Tinggi Vokasi (orang)

[IKP 1.1] Persentase Capaian 87,21%



Gambar 3.3 Grafik Perbandingan Capaian 2023, Target 2024 dan Capaian 2024, dan Target Akhir Renstra

Dokumentasi Kegiatan

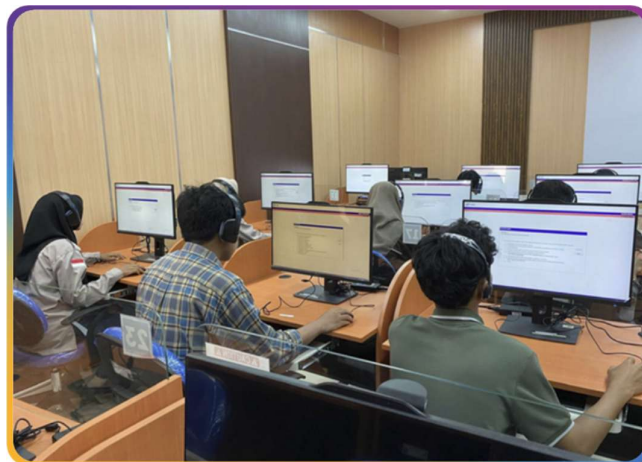
Berikut ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung capaian IKP 1.1.



Gambar 3.4 Proses Pembangunan Gedung Laboratorium Penerima SBSN di Politeknik Negeri Padang



Gambar 3.5 Pengadaan Peralatan Penerima SBSN di Politeknik Negeri Lhokseumawe



Gambar 3.6 Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan MBKM *Indonesian International Student Mobility Award (IISMA)* melalui BOPTN Insentif IKU di Politeknik Negeri Sambas



Gambar 3.7 Penggunaan Dukungan Layanan Operasional pada Kegiatan Peringatan Hari Mekatronika di Politeknik Negeri Ujung Pandang

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Dukungan layanan operasional, pembelajaran dan sarana prasarana pada 49 Politeknik dan AKN untuk mendukung dan memastikan proses belajar dan mengajar pada perguruan tinggi vokasi negeri dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Dalam rangka mendukung peningkatan sarana dan prasarana perguruan tinggi vokasi diberikan bantuan SBSN di tahun 2024 pada 9 perguruan tinggi vokasi, yaitu Politeknik Negeri Lhokseumawe, Politeknik Negeri Padang, Politeknik Negeri Batam, Politeknik Negeri Lampung, Politeknik Manufaktur Negeri Bandung, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Politeknik Negeri Jember, Politeknik Negeri Bali, dan Politeknik Negeri Fakfak.
3. Penambahan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi (BOPTN Vokasi) berupa insentif IKU, anggaran digunakan oleh Politeknik dan AKN untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan, pembayaran honor tenaga pendidik dan kependidikan non ASN, dan pengadaan peralatan pendukung pembelajaran.
4. Ditjen Pendidikan Vokasi mempublikasikan hasil produk dan prestasi yang diraih oleh insan vokasi di *website* resmi dan media sosial untuk menarik perhatian siswa agar memilih melanjutkan pendidikannya ke vokasi.
5. Ditjen Pendidikan Vokasi mengadakan acara Vokasi Fest yang merupakan acara tahunan yang dilakukan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pendidikan vokasi, pameran, dan pentas seni. Vokasi Fest dilaksanakan dengan tekad yang kuat untuk mengenalkan, mempromosikan, dan merayakan kontribusi penting pendidikan vokasi dalam mempersiapkan lulusan vokasi terjun ke dunia kerja, berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan.

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain :

1. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat partisipasi masyarakat pada Pendidikan Tinggi masih rendah untuk kelompok masyarakat pengeluaran terendah (kuintil 1,2, dan 3), hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada pendidikan tinggi vokasi.
2. Berdasarkan hasil Susenas kor 2024, APK Perguruan tinggi Vokasi adalah 32,00 hanya naik 0,55 poin dibanding dengan tahun 2023. Pertumbuhan APK yang cukup rendah ini tentu saja berdampak pada peningkatan jumlah mahasiswa

pendidikan tinggi vokasi.

3. Minat lulusan sekolah menengah untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi vokasi masih cukup rendah dibandingkan dengan perguruan tinggi akademik. Salah satu penyebabnya adalah PT Akademik banyak yang sudah menjadi PTN-BH dan membuka sekolah vokasi, fasilitas dan beasiswa yang ditawarkan oleh PT Akademik lebih banyak dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh PT Vokasi.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Alat pembelajaran yang dibutuhkan sebagian besar adalah barang *import*. Untuk mensubstitusi dengan barang yang mengandung PDN/TKDN diperlukan proses identifikasi yang cukup lama, agar kualitas dan spesifikasi tetap sesuai dengan yang diharapkan.
2. Adanya kesalahpahaman politeknik dan AKN penerima insentif IKU terkait penggunaan anggaran sehingga harus mengulang penyusunan kembali dokumen RAB.
3. Pada pelaksanaan SBSN di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, beberapa pekerjaan yang sudah diselesaikan tidak dapat diakui sebagai progres karena menunggu proses CCO. Pelaksanaan SBSN di Politeknik Negeri Fakfak, beberapa material terlambat tersedia sehingga pekerjaan pemasangan kaca dan pekerjaan toilet terlambat. Di beberapa politeknik penerima SBSN belum bisa melakukan pengadaan meubelair karena harus menunggu gedung selesai untuk dijadikan tempat penyimpanan meubelair.
4. Pada pemanfaatan penambahan BOPTN berupa insentif IKU, beberapa Politeknik dan AKN yang menggunakan insentif untuk pengadaan peralatan pendukung pembelajaran terkendala dengan izin dan proses *clearance* TIK.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan identifikasi PDN/TKDN yang memiliki kualitas dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
2. Politeknik dan AKN penerima insentif IKU segera melakukan penyusunan ulang dokumen-dokumen RAB yang salah.
3. Melakukan koordinasi internal dengan Inspektorat Jenderal terkait reviu pelaksanaan CCO, dan menyegerakan pemenuhan material ke lokasi.

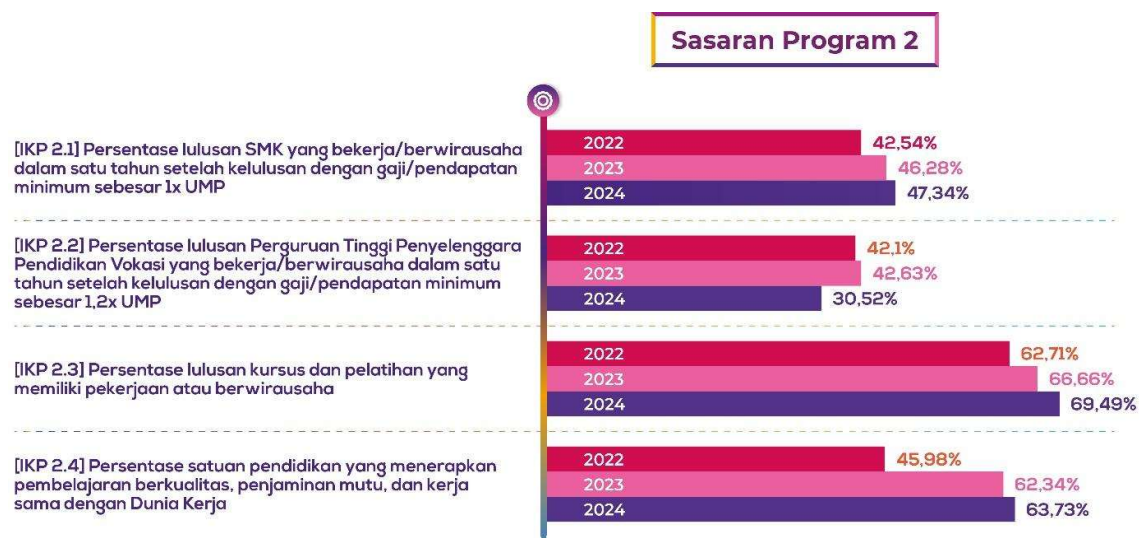
4. Berkoordinasi dengan Pusdatin dan pihak terkait untuk mempercepat proses ijin dan proses *clearance*.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana serta aktivitas pada perguruan tinggi vokasi melalui penyediaan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN).
2. Memberikan anggaran tambahan khususnya kepada perguruan tinggi vokasi berupa insentif penyediaan dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (BOPTN) yang dapat mencapai target IKU.
3. Mengoptimalkan penggunaan anggaran SBSN untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana di perguruan tinggi vokasi.

Sasaran Program 2. Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja

Sampai dengan tahun 2024, peningkatan mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan kerja ada yang mengalami penurunan dan ada pula yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat pada grafik berikut,



Gambar 3.8 Trend Capaian Tahun 2022-2024 pada Seluruh IKP di SP 2

Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan diantaranya:

- 1) Pelaksanaan SMK pusat keunggulan yang didorong untuk memberikan imbas praktik baiknya kepada SMK di sekitarnya;
- 2) Sertifikasi kompetensi kepada siswa SMK;
- 3) SMK yang mendukung industri 4.0 dengan tujuan untuk menciptakan lulusan dengan kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini;
- 4) SMK mendukung produk kreatif dan kewirausahaan yang bertujuan untuk menciptakan lulusan SMK dengan kemampuan entrepreneurship;
- 5) Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri (*Competitive Fund*) dan Program Penguatan Perguruan Tinggi Vokasi Perguruan Tinggi Swasta (P3TV-PTS);
- 6) Pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan profesi kepada SDM pendidikan tinggi vokasi;
- 7) Penyusunan kurikulum pendidikan tinggi vokasi berbasis industri dan Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI);
- 8) Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW);
- 9) Pelatihan dan peningkatan kompetensi untuk guru, kepala sekolah, dan instruktur kursus berupa *upskilling* dan *reskilling*;
- 10) *Matching Fund* yang bertujuan untuk mendorong kerjasama/kolaborasi yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dan mitra berbasis riset dan/atau kepakaran perguruan tinggi untuk menyelesaikan masalah DUDI atau pemberdayaan masyarakat.

IKP 2.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/ pendapatan minimum sebesar 1x UMP

Capaian IKP 2.1 pada tahun 2024 diperoleh dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Mengingat data yang digunakan untuk mengukur ketercapaian IKP ini merupakan data survei, dimana pengumpulan data dilakukan melalui pencacahan sampel dari populasi pada blok sensus, maka data yang ditampilkan adalah data relatif, bukan angka absolut.

Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja atau berwirausaha. Lulusan pendidikan vokasi yang dimaksud pada Indikator Kinerja Program ini berasal dari lulusan SMK.

Adapun kriteria bekerja menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah :

1. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut

termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

2. Lulusan yang bekerja pada indikator ini adalah lulusan yang bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja bebas di pertanian, dan Pekerja bebas di nonpertanian.
3. Berwirausaha adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif. Berwirausaha yang dimaksud pada indikator ini adalah berusaha sendiri.
4. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
5. Upah/gaji pokok dan tunjangan yang merupakan imbalan/balas jasa yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai selama sebulan terakhir dari pekerjaan utama, baik berupa uang maupun barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan.
6. Upah/gaji pokok adalah imbalan dalam bentuk uang dan atau barang yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan yang dimaksud adalah penerimaan buruh/karyawan/pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan biaya hidup/tunjangan kemahalan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang.
8. Pendapatan pekerja bebas adalah segala bentuk pembayaran dan manfaat yang diperoleh dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diterima dalam periode tertentu oleh seseorang untuk diri sendiri dan keluarganya sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran dan manfaat bisa berasal dari pemberi kerja, profit, manfaat jaminan sosial terkait pekerjaan (misalnya program bantuan pemerintah), atau asuransi wajib pemerintah.

UMP (Upah Minimum Provinsi) atau Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan Permenaker Nomor 15 Tahun 2018.

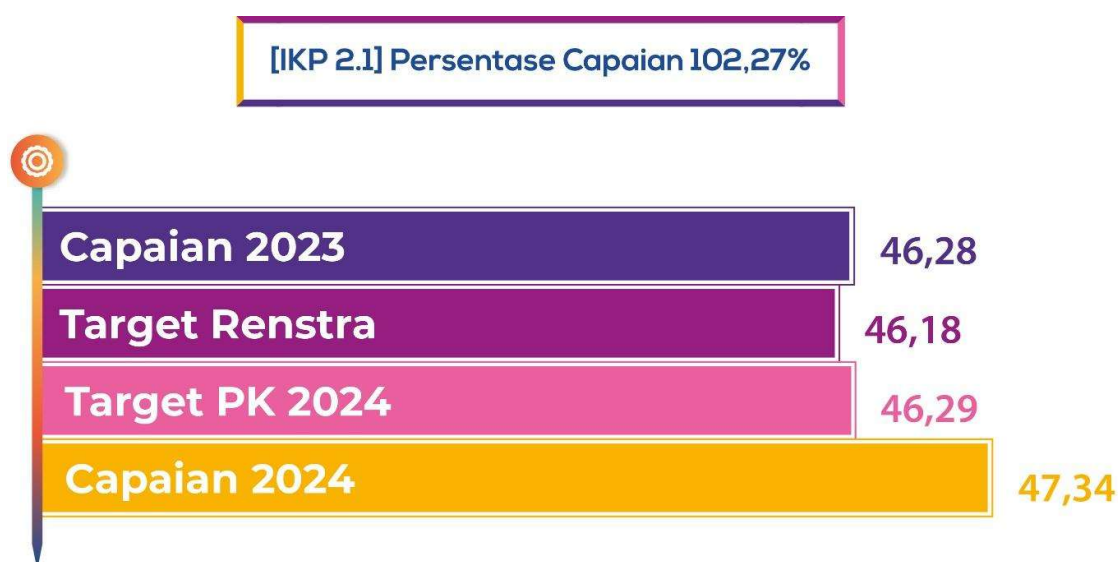
Formula perhitungan untuk IKP 2.1 adalah dengan menghitung jumlah lulusan

SMK yang bekerja atau berwirausaha dalam 1 tahun setelah kelulusan dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1x UMP dibagi dengan jumlah lulusan SMK dalam 1 tahun setelah kelulusan kemudian dikalikan 100%. Satuan yang digunakan adalah % (persen) dengan metode perhitungan non kumulatif.

$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Jumlah lulusan SMK yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja atau berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1x UMP}}{\text{Jumlah lulusan SMK dalam 1 tahun setelah kelulusan}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Program	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji / pendapatan minimum sebesar 1xUMP	46,28	46,29	47,34	102,27	46,29	102,27

Berdasarkan data sakernas bulan Agustus yang dirilis di bulan Desember tahun 2024, capaian IKP ini adalah sebesar 47,34%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 46,28%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 1,06%. Capaian ini juga sudah melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2024 yang menjadi target akhir renstra yaitu sebesar 46,29%, atau mencapai 102,27%.



Gambar 3.9 Grafik Perbandingan Capaian 2023, Target 2024 dan Capaian 2024, dan Target Renstra

Dokumentasi Kegiatan

Berikut ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung capaian IKP 2.1



Gambar 3.10 Pembangunan Fisik dari Program SMK PK



Gambar 3.11 Pelaksanaan Kegiatan dari Program SMK PK



Gambar 3.12 Workshop pada Pelaksanaan Program SMK Berbasis Industri 4.0



Gambar 3.13 Workshop pada Pelaksanaan Program SMK *Teaching Factory*

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Bantuan Sertifikasi Kompetensi Siswa SMK

Pelaksanaan program sertifikasi kepada peserta didik SMK merupakan salah satu upaya agar lulusan SMK memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan DUDI, sehingga mampu memperoleh pendapatan sesuai dengan standar pada saat diterima di dunia kerja. Program ini diberikan kepada 101.198 siswa SMK.

2. Siswa yang mendapatkan Penguatan Persiapan Magang Luar Negeri

Upaya mempersiapkan lulusan SMK agar mampu bersaing sebagai pekerja migran dilakukan melalui program penguatan persiapan magang luar negeri. Penguatan pembelajaran dan peningkatan kompetensi bahasa serta budaya negara yang akan dituju diberikan kepada peserta didik, salah satunya melibatkan kerjasama dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang telah mengantongi izin dari Kementerian Tenaga Kerja. Program ini diberikan kepada 3.639 siswa SMK.

3. SMK yang Dikembangkan menjadi Pusat Keunggulan

Program Pengembangan SMK Pusat Keunggulan saat ini ada yang diusulkan melalui skema pemadanan dengan mitra dunia industri, dengan melibatkan industri dalam pengembangan SMK dan diharapkan mampu menghasilkan lulusan sesuai kebutuhan DUDI, selain itu skema reguler tetap dilakukan. SMK Pusat Keunggulan skema pemadanan ditetapkan dalam bentuk SK sebanyak 542 SMK, sementara untuk SMK Pusat Keunggulan Reguler ditetapkan dalam bentuk SK sebanyak 937 SMK, dengan rincian yang baru sebanyak 237 SMK dan yang lanjutan 700 SMK.

4. SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0

Program pengembangan SMK dalam mendukung industri 4.0 diharapkan mampu menciptakan lulusan dengan kompetensi keahlian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi terkini. Pada program SMK yang Dikembangkan Berbasis Industri 4.0 sudah dilakukan penetapan dalam bentuk SK sebanyak 63 SMK.

5. Penyaluran Bantuan SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan

Program ini dilaksanakan untuk menciptakan lulusan SMK dengan kemampuan entrepreneurship. Lulusan ditargetkan agar memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan sesuai dengan standar upah minimal yang ditentukan. Penyaluran bantuan SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan telah dilakukan penetapan dalam bentuk SK sebanyak 240 SMK.

6. SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*)

Upaya untuk mendorong siswa agar merasakan pengalaman pembelajaran sesuai dunia kerja salah satunya melalui model pembelajaran *teaching factory*. Pada tahun 2024 program SMK yang melaksanakan *teaching factory* diberikan sebagai bentuk untuk mendorong terlaksananya model pembelajaran ini di satuan pendidikan, dimana terdapat 2 skema yaitu reguler dan pengimbasan. SMK yang mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) telah ditetapkan dalam bentuk SK sebanyak 25 SMK pada skema reguler dan 265 SMK dengan skema pengimbasan.

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain:

1. Melakukan sosialisasi dan pendampingan pelaksanaan program kepada semua SMK penerima bantuan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan, serta memastikan penerima bantuan melaksanakan kegiatan sesuai dengan lini masa dan prosedur.
2. Melakukan pemantauan secara berkala, dan memastikan semua SMK penerima bantuan melakukan pelaporan dengan tepat waktu sebagai alat ukur keterlaksanaan program.
3. Adanya penguatan kemitraan antara SMK dan dunia kerja melalui program kerjasama, sehingga kompetensi lulusan lebih relevan dengan kebutuhan industri.

4. Penjaminan mutu dan kualitas lulusan SMK melalui sertifikasi kompetensi dan bahasa yang diakui industri.
5. Pengembangan jiwa kewirausahaan siswa SMK melalui program produk kreatif dan kewirausahaan, penambahan jam pelajaran kewirausahaan, serta pembinaan kepada SMK untuk menjadi BLUD.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Dalam pelaksanaan program SMK PK perlu dilakukan kurasi melalui verifikasi dan validasi lebih mendetail terhadap komponen kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap bentuk nilai padanan yang akan diberikan oleh mitra industri, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama pada saat proses seleksi sekolah calon penerima program bantuan.
2. Untuk mendapatkan sertifikat yang diakui oleh dunia kerja diperlukan data dukung yang komprehensif serta proses verifikasi oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk, sehingga dibutuhkan waktu yang lebih lama.
3. Target sasaran DIPA Awal adalah 85.000 siswa akan diberikan sertifikasi kompetensi, 30.000 siswa untuk sertifikasi bahasa Inggris dan 10.000 untuk bahasa asing selain bahasa Inggris. Namun, dalam pelaksanaannya untuk bahasa asing lainnya non bahasa Inggris tidak memenuhi kuota dikarenakan sulitnya SMK yang siap dengan lembaga sertifikasi yang dipersyaratkan sehingga hanya tercapai 5.933 siswa.
4. Beberapa sekolah yang mendapatkan program SMK yang Mengembangkan Pengajaran Berbasis Pabrik (*Teaching Factory*) dan program-program lainnya mengalami kendala dalam mencari narasumber yang mampu memberikan materi kegiatan workshop sebagai bentuk peningkatan wawasan bagi seluruh komunitas yang ada di sekolah.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Pelibatan berbagai pihak (praktisi, akademisi) untuk membantu pelaksanaan kurasi kegiatan padanan dari mitra industri untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
2. Berkoordinasi dengan dinas serta kementerian perindustrian terkait pelaksanaan program SMK pendukung industri 4.0 sehingga kegiatan dapat terlaksana sesuai

dengan target yang diharapkan.

3. Melakukan revisi anggaran terhadap target yang tidak tercapai dari pelaksanaan sertifikasi bahasa asing lainnya non bahasa Inggris yang dialihkan pada sertifikasi kompetensi. Hal ini mengakibatkan targetnya berubah menjadi sebanyak 101.198 siswa yang akan diberikan sertifikasi profesi dan perlu dilakukan dibuka pelaksanaan seleksi kembali.
4. Melibatkan akademisi yang memahami secara praktis proses pembelajaran/pengajaran berbasis pabrik (*Teaching Factory*) sebagai narasumber, atau melibatkan praktisi UMKM dalam mendukung pembelajaran di sekolah.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Memfasilitasi SMK untuk menjalin kerjasama saling menguntungkan dengan DUDI, dengan harapan adanya investasi untuk memberi intervensi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang nantinya akan berdampak pada kompetensi lulusan SMK yang sesuai dengan industri.
2. Memperkuat sistem penjaminan mutu dan kualitas lulusan SMK melalui peningkatan dan pemerataan SMK agar memiliki lembaga sertifikasi yang terlisensi BNSP serta pelaksanaan sertifikasi yang berafiliasi dengan dunia kerja atau asosiasi profesi.
3. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada siswa SMK melalui pembentukan inkubator - inkubator usaha serta mendorong SMK untuk mengembangkan kegiatan - kegiatan terkait kewirausahaan.
4. Meningkatkan tata kelola dan manajemen di satuan pendidikan SMK melalui pembentukan BLUD serta stimulasi pemberdayaan sumberdaya yang ada untuk memperoleh sumber dana lainnya sehingga sekolah dapat melakukan upaya pembenahan dan pemenuhan operasional secara mandiri.

IKP 2.2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP

Capaian IKP 2.2 pada tahun 2024 diperoleh dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) periode Agustus tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Mengingat data yang digunakan untuk mengukur ketercapaian IKP ini merupakan data survei, dimana pengumpulan data dilakukan melalui pencacahan sampel dari populasi pada blok sensus, maka data yang ditampilkan adalah data

relatif, bukan angka absolut.

Keberhasilan pendidikan vokasi salah satunya diukur dari lulusan yang dapat diterima di dunia kerja atau berwirausaha. Lulusan Pendidikan vokasi yang dimaksud pada Indikator Kinerja Program ini berasal dari lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (Program Diploma I, II, III, dan IV/Sarjana Terapan).

Adapun kriteria bekerja menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah :

1. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.
2. Lulusan yang bekerja pada indikator ini adalah lulusan yang bekerja sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai, Pekerja bebas di pertanian, dan Pekerja bebas di nonpertanian;
3. Berwirausaha adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif. Berwirausaha yang dimaksud pada indikator ini adalah berusaha sendiri.
4. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.
5. Upah/gaji pokok dan tunjangan yang merupakan imbalan/balas jasa yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai selama sebulan terakhir dari pekerjaan utama, baik berupa uang maupun barang yang dibayarkan oleh perusahaan/kantor/majikan.
6. Upah/gaji pokok adalah imbalan dalam bentuk uang dan atau barang yang diterima oleh buruh/karyawan/pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan yang dimaksud adalah penerimaan buruh/karyawan/pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya seperti tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan tunjangan biaya hidup/tunjangan kemahalan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang.

8. Pendapatan pekerja bebas adalah segala bentuk pembayaran dan manfaat yang diperoleh dalam bentuk uang, barang dan jasa yang diterima dalam periode tertentu oleh seseorang untuk diri sendiri dan keluarganya sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Pembayaran dan manfaat bisa berasal dari pemberi kerja, profit, manfaat jaminan sosial terkait pekerjaan (misalnya program bantuan pemerintah), atau asuransi wajib pemerintah.

UMP (Upah Minimum Provinsi) atau Upah Minimum adalah upah bulanan terendah berupa upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan Permenaker Nomor 15 Tahun 2018.

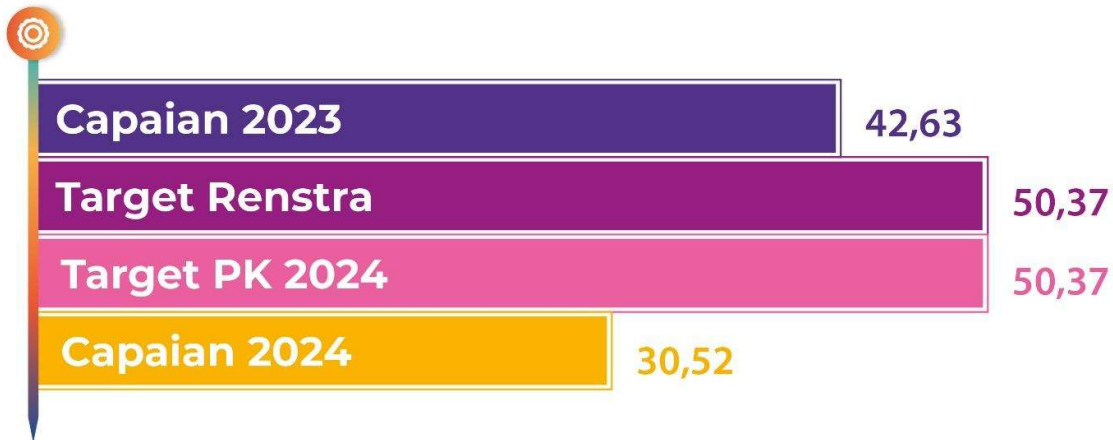
Formula perhitungan untuk IKP 2.2 adalah dengan menghitung Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja atau berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1,2x UMP dibagi dengan Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi dalam 1 tahun setelah kelulusan dikalikan 100%.

$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Persentase lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam 1 tahun setelah kelulusan, bekerja atau berwirausaha dengan upah/gaji/pendapatan minimum 1,2x UMP}}{\text{Jumlah lulusan Pendidikan Tinggi Vokasi dalam 1 tahun setelah kelulusan}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Program	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	42,63	50,37	30,52	60,59	50,37	60,59

Berdasarkan data sakernas bulan Agustus tahun 2024, capaian IKP ini adalah sebesar 30,52%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 42,63%, capaian ini mengalami penurunan sebesar 12,11%. Capaian ini pun belum memenuhi target yang ditetapkan dan target akhir renstra yaitu sebesar 50,37%, atau baru mencapai 60,59%.

[IKP 2.2] Persentase Capaian 60,59%



Gambar 3.14 Grafik Perbandingan Capaian 2023, Target 2024 dan Capaian 2024, dan Target Akhir Renstra

Dokumentasi Kegiatan

Berikut ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung capaian IKP 2.2



Gambar 3.15 Ujicoba Peralatan dari Bantuan P3TV-PTS di STIKES Cendekia Medika



Gambar 3.16 Alat Pembuka Kelapa dari Bantuan *Competitive Fund* (CF) di Politeknik Negeri Ketapang



Gambar 3.17 Printer 3D dari Bantuan *Competitive Fund* (CF) di PPNS



Gambar 3.18 Kegiatan PKM berupa Penyaluran Alat Pengelola Sampah oleh Politeknik Negeri Cilacap



Gambar 3.19 Kegiatan POMN berupa Alat Pengering Batik oleh Politeknik Negeri Madiun



Gambar 3.20 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa di AKN Pacitan



Gambar 3.21 Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa di Politeknik Negeri Banjarmasin



Gambar 3.22 Pelaksanaan Bimtek SPMI



Gambar 3.23 Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Industri melalui Sosialisasi Permendikbudristek 53/2023 di Politeknik Negeri Ambon

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Program Pendidikan Tinggi Vokasi yang menerapkan Penguatan Mutu Berstandar Industri (*Competitive Fund*), dengan total 98 Program Studi telah menerima bantuan program dan seluruh dana bantuan yang diterima ditujukan untuk proses penguatan mutu berstandar industri.
2. Program P3TV-PTS tahun 2024 telah ditetapkan 59 Perguruan Tinggi Swasta yang lolos verifikasi administrasi dan evaluasi kelayakan sebagai penerima bantuan. Bantuan yang diberikan berupa barang yang relevan dengan pembelajaran pada prodi yang akan ditingkatkan mutunya dan bukan untuk mendukung penelitian dosen.

3. Program Peningkatan Kompetensi SDM Pendidikan Tinggi Vokasi diberikan kepada 939 dosen Perguruan Tinggi Vokasi sesuai dengan bidang yang dimiliki melalui Sertifikasi Kompetensi.
4. Program Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa (Sertikom), disalurkan bantuan kepada 15.013 mahasiswa dalam bentuk uji kompetensi mahasiswa vokasi untuk mendapatkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BNSP.
5. Program Ormawa Membangun Negeri (POMN), disalurkan bantuan kepada 1.040 mahasiswa, yang merupakan program yang dilakukan oleh mahasiswa melalui UKM, HIMAProdi, dan BEM, dengan tujuan menumbuhkan kepedulian dan mengundang kontribusi mahasiswa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), sudah disalurkan bantuan kepada 2.082 mahasiswa, sebagai upaya untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa.
7. Program Pendanaan Magang Mahasiswa Vokasi di Luar Negeri (*Global Internship for Vocational Education / GIVE*) adalah fasilitasi dana bantuan yang diberikan untuk mahasiswa program studi vokasi yang akan melaksanakan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang dilaksanakan di luar negeri dalam proses pembelajaran. Tujuan pelaksanaan program adalah untuk mendukung penyelenggaraan magang mahasiswa program studi vokasi di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja luar negeri, dengan harapan lulusan memiliki kualitas dan daya saing yang diakui di negara lain dan di berbagai jenis industri. Program GIVE ini diberikan ke sebanyak 513 mahasiswa.
8. Kurikulum Berbasis Industri dengan tujuan mempercepat pemahaman dalam menyusun kurikulum *link and match* melalui Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023, pada tahun 2024 diberikan dalam bentuk fasilitasi pemberian insentif dengan sasaran 49 Perguruan Tinggi Negeri dengan besaran masing - masing Perguruan Tinggi sebesar 60 juta rupiah dengan target satu Perguruan Tinggi sebanyak 6-7 Program Studi.
9. Pembinaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berguna untuk peningkatan budaya mutu pada Perguruan Tinggi vokasi untuk meningkatkan kualitas dan standar lulusan yang dapat meningkatkan daya saing lulusan sehingga bisa diterima oleh industri lokal, nasional dan internasional, untuk pelaksanaan peningkatan budaya mutu dapat dilihat dari jumlah perguruan Tinggi yang telah melaporkan pelaksanaan SPMI pada aplikasi di PDDikti.

Faktor penyebab kegagalan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain:

1. Kebekerjaan lulusan pendidikan tinggi vokasi masih terkendala dengan upah dimana peningkatan upah lulusan satu tahun setelah kelulusan tidak sebanding dengan peningkatan UMP *fresh graduate*, apalagi indikator keberhasilannya adalah lulusan baru dengan upah 1,2 kali UMP.
2. Satu tahun setelah kelulusan pada umumnya lulusan pendidikan vokasi masih mencari pengalaman kerja sehingga tidak terlalu mempertimbangkan upah, seiring dengan bertambahnya pengalaman kerja biasanya upah akan semakin tinggi.
3. UMP setiap provinsi berbeda-beda sedangkan sampel yang digunakan pada Sakernas sebarannya tidak melihat besaran UMP masing-masing wilayah, tetapi lebih mempertimbangkan jumlah penduduk.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Masih terbatasnya jenis peralatan yang memiliki TKDN menjadi kendala dalam penyusunan lampiran barang, berdampak pada terbatasnya variasi jenis peralatan yang dapat dipilih.
2. Permendikbud tentang magang mahasiswa di luar negeri masih dalam proses penyusunan oleh tim Biro Hukum Kemendikbud Ristek, sedangkan kasus magang mahasiswa luar negeri yang dilaksanakan oleh PTN/PTS belum tuntas diputuskan pada jalur hukum. Hal ini mengakibatkan adanya keraguan kampus dalam merencanakan kegiatan magang mahasiswa di luar negeri. Pembiayaan kegiatan magang mahasiswa di luar negeri perlu mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan, hal ini diperlukan untuk mencegah adanya permasalahan lain pada kegiatan magang mahasiswa luar negeri.
3. Terdapat sisa anggaran dari total nilai bantuan P3TV-PTS yang telah dikompilasi pada tahap finalisasi program dan anggaran.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Identifikasi dini terhadap TKDN/PDN yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
2. Melanjutkan penyusunan panduan teknis magang luar negeri sebagai aturan teknis pelaksanaan Magang Mahasiswa Luar Negeri yang bersamaan dengan

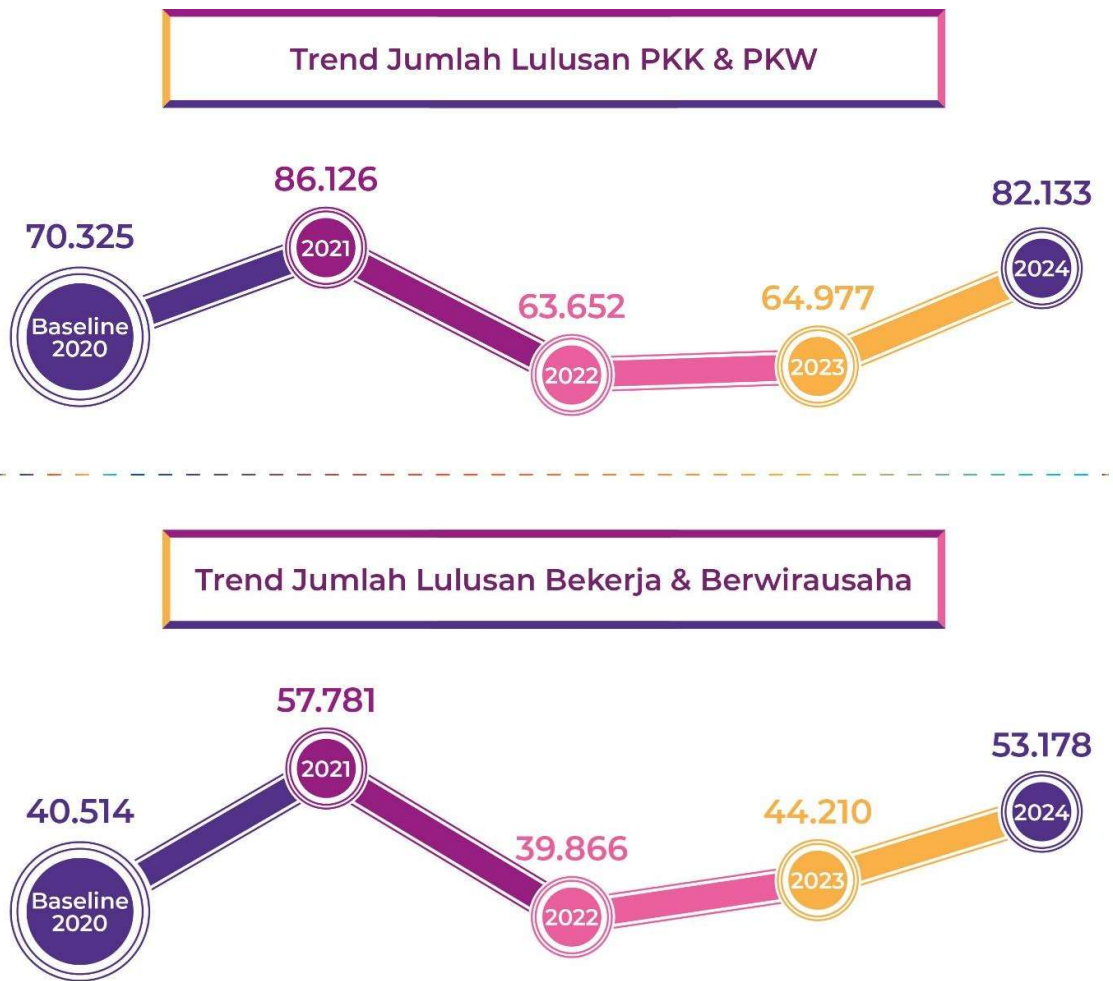
kegiatan penyusunan rancangan permendikbud tentang magang mahasiswa luar negeri.

3. Sebagai optimalisasi anggaran P3TV-PTS akan dilaksanakan proses seleksi untuk tahap 2.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Pelaksanaan program yang berupa bantuan pemerintah dilakukan pengesahan petunjuk teknis dan proses sosialisasi pada T-1, agar pada triwulan 1 tahun berjalan pendaftaran dan seleksi dapat segera dilaksanakan.
2. Melakukan pemantauan secara berkala, dan memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disahkan.
3. Pada pelaksanaan program sertifikasi kompetensi dosen perlu dilakukan penguatan pendanaan, peningkatan infrastruktur, fleksibilitas dan jenjang program, kolaborasi berkelanjutan, dan dukungan institusi.

IKP 2.3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha



Gambar 3.24 Trend jumlah Peserta Didik Program PKK dan PKW yang Memiliki Pekerjaan atau Berwirausaha pada Tahun 2020-2024

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program pendidikan vokasi yang mendukung capaian ini diantaranya Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW).

PKK merupakan layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi untuk bekerja dan terserap di dunia kerja. PKW merupakan suatu layanan pendidikan dalam bentuk kursus dan

pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang menjadikan bekal untuk berwirausaha dan merintis berdirinya usaha mandiri yang dibimbing oleh mitra usaha.

Lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha adalah lulusan PKK atau PKW yang bekerja atau berwirausaha 1 tahun setelah kelulusan dari satuan kursus dan pelatihan yang ber-NPSN yang diselenggarakan minimal 100 jam pelajaran. Kursus dan pelatihan dimaksud adalah jenis keterampilan vokasi yang berbasis dunia kerja.

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Berwirausaha adalah aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif. Berwirausaha yang dimaksud pada indikator ini adalah berusaha sendiri, berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar, dan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

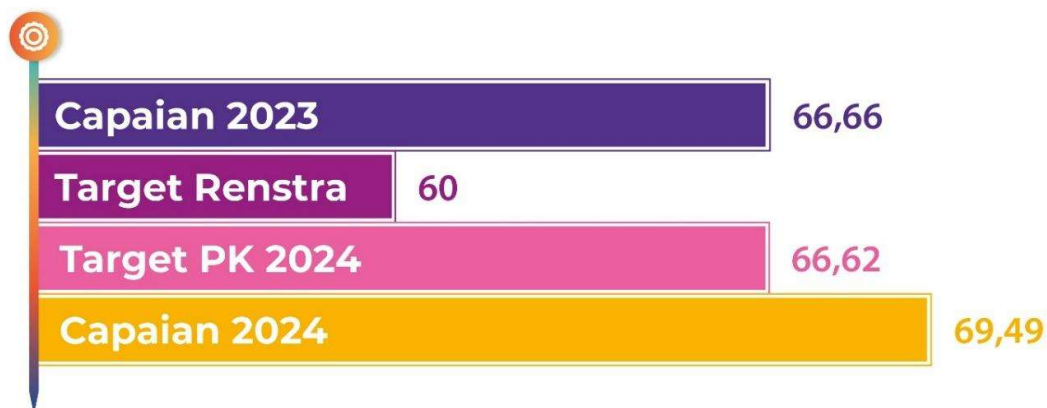
Formula perhitungan untuk IKP 2.3 adalah dengan menghitung jumlah lulusan PKK atau PKW yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha dibagi dengan jumlah lulusan PKK dan PKW kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Jumlah lulusan PKK atau PKW yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha}}{\text{Jumlah lulusan PKK dan PKW}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Program	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	66,66	66,62	69,49	104,3	60,00	115,8

Capaian IKP 2.3 pada tahun 2024 diperoleh dari perhitungan jumlah lulusan PKK dan PKW yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha yaitu sebanyak 57.217 orang dibagi dengan jumlah lulusan PKK dan PKW sebanyak 82.336 orang, sehingga mendapatkan capaian sebesar 69,49%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 66,66%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 2,83%. Kemudian jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 60%, capaian ini juga sudah melampaui target sebesar 9,49% atau sudah mencapai 115,8%.

[IKP 2.3] Persentase Capaian 104,31%



Gambar 3.25 Grafik Perbandingan Capaian 2023, Target 2024 dan Capaian 2024, dan Target Akhir Renstra

Dokumentasi Kegiatan

Berikut ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung capaian IKP 2.3



Gambar 3.26 Program PKK pada Bidang Keahlian Kapal Pesiar



Gambar 3.27 Program PKK pada Bidang Keahlian Pijat Refleksi



Gambar 3.28 Program PKK pada Bidang Keahlian Perhotelan



Gambar 3.29 Program PKW pada Bidang Keahlian *Pastry and Bakery*

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Program Kecakapan Kerja (PKK), dengan total peserta didik yang telah menerima bantuan PKK sebanyak 57.401 orang peserta didik, dan dari jumlah tersebut peserta didik yang telah bekerja sebanyak 28.937 orang.
2. Program Kecakapan Wirausaha (PKW), dengan total peserta didik yang telah menerima bantuan PKW sebanyak 24.732 orang peserta didik, dari jumlah tersebut peserta didik yang telah merintis usaha sebanyak 21.012 orang.
3. Jumlah Satuan Pendidikan Kursus dan Pelatihan yang Menerapkan Pembelajaran sesuai dengan Kebutuhan Dunia Kerja, meliputi kegiatan:
 - a. SKL, kurikulum dan bahan ajar yang disusun sesuai kebutuhan dunia kerja

- b. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan dunia kerja (PjBL)
- c. LKP yang menyelenggarakan pembelajaran daring
- d. LKP yang dinilai kinerja lembaga
- e. Instruktur dan pengelola LKP magang di dunia kerja
- f. Penguji Uji kompetensi yang ditingkatkan kompetensinya
- g. LKP yang menyelenggarakan program RPL dengan Perguruan Tinggi
- h. LKP yang mempunyai pusat pengembangan karir
- i. LKP yang siap bertransformasi menjadi Akademi Komunitas

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain:

1. Adanya perbedaan biaya kursus pada masing-masing jenis keterampilan, sehingga mampu menjangkau lebih banyak sasaran.
2. Adanya persyaratan dalam petunjuk teknis yang mewajibkan lembaga penyelenggara program PKK dan PKW untuk memiliki perjanjian kerjasama dengan mitra industri untuk penyaluran tenaga kerja lulusan program PKK dan mitra UMKM, permodalan, dan pemasaran untuk pendampingan rintisan usaha bagi lulusan program PKW.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Masih lambatnya pengajuan proposal oleh lembaga dan banyak proposal yang belum memenuhi persyaratan.
2. Telah dilakukan sosialisasi di Kabupaten/Kota yang masuk ke dalam kategori daerah 3T dan kantung kemiskinan, akan tetapi proposal yang diajukan masih terbatas.
3. Pada program RPL terkendala adanya keterbatasan program studi RPL dengan bidang keterampilan yang diselenggarakan LKP dalam satu wilayah, serta biaya kuliah program RPL relatif lebih tinggi dari penerimaan regular.
4. Setelah pemetaan penugasan verifikator diketahui bahwa verifikator yang ada tidak mewakili seluruh daerah LKP sasaran PK-LKP tahun 2024, dan terdapat beberapa verifikator baru dari Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Direktorat Kursus dan Pelatihan.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan sosialisasi dan koordinasi kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota, satuan pendidikan, organisasi mitra kursus dan pelatihan.
2. Melakukan pendampingan bagi lembaga pada wilayah 3T dan afirmasi.
3. Mendorong LKP untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi lintas wilayah serta melakukan penjajakan untuk memungkinkan peserta didik pada jalur RPL mendapatkan beasiswa.
4. Verifikator melibatkan dari unsur Ditsuslat, dalam kegiatan pembekalan sebelum pelaksanaan verifikasi, dan verifikator baru dari Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Ditsuslat ditugaskan berpasangan dengan verifikator dari UPT.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan Kabupaten/Kota untuk pemetaan sasaran anak usia sekolah tidak sekolah.
2. Melakukan koordinasi dengan organisasi mitra untuk sosialisasi program kursus dan pelatihan.

IKP 2.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja

Satuan Pendidikan berdasarkan pasal 1 PP Nomor 57 Tahun 2021 adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan. Lingkup satuan pendidikan vokasi adalah SMK, Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi, dan LKP bidang vokasional.

Pembelajaran dikatakan berkualitas apabila pembelajaran melibatkan seluruh komponen utama proses belajar mengajar, yaitu guru, siswa dan interaksi antara keduanya, serta didukung oleh berbagai unsur-unsur pembelajaran, meliputi kurikulum yang sudah diselaraskan dengan dunia kerja, metode pembelajaran (PBL, Tefa, CBL, CML), dan sarana prasarana yang menunjang, termasuk platform digital. Penjaminan Mutu Pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu.

Kerja sama Satuan Pendidikan Vokasi dengan dunia kerja meliputi:

1. Satuan Pendidikan Vokasi yang belum pernah melakukan kerja sama dengan dunia kerja.
2. Satuan Pendidikan Vokasi yang sudah bermitra dengan dunia kerja, tetapi perlu diperluas jumlah mitranya.
3. Satuan Pendidikan Vokasi yang sudah melaksanakan kerja sama, dan perlu ditindak lanjuti dengan pola kemitraan berkelanjutan dalam bentuk program kegiatan nyata, yang dapat mendorong terwujudnya *link and match*.

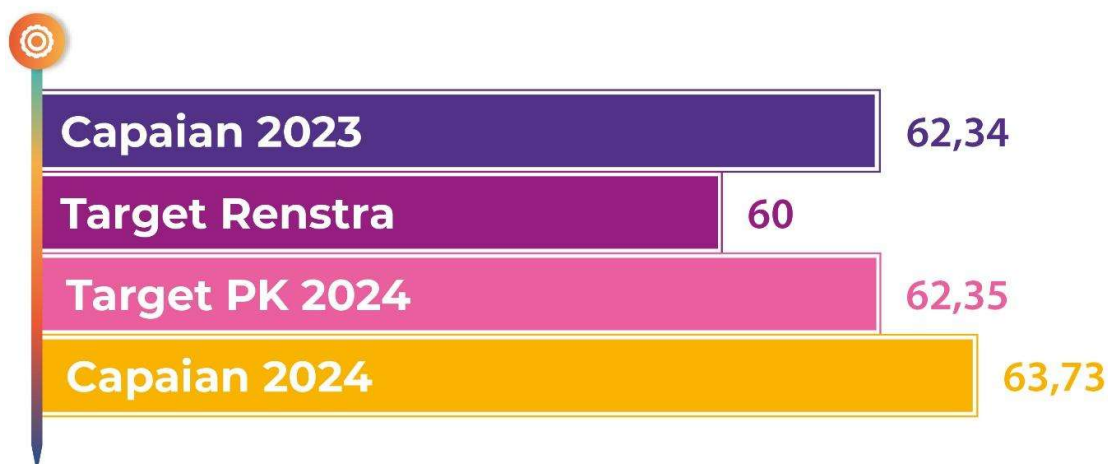
Formula perhitungan untuk IKP 2.4 adalah dengan menjumlahkan jumlah satuan pendidikan vokasi dengan pembelajaran berkualitas dengan jumlah satuan pendidikan vokasi yang mengimplementasikan standar mutu pendidikan vokasi (8 + i) serta jumlah satuan pendidikan vokasi yang memiliki kerja sama dengan dunia kerja kemudian dibagi dengan jumlah satuan pendidikan vokasi dan dikalikan 100%.

$$\text{Realisasi IKP} = \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan vokasi dengan pembelajaran berkualitas + yang mengimplementasikan 8+i + yang memiliki kerja sama dengan dunia kerja}}{\text{Jumlah Satuan Pendidikan Vokasi}} \times 100\%$$

Indikator Kinerja Program	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	62,34	62,35	63,37	101,6	60	105,6

Capaian IKP 2.4 pada tahun 2024 diperoleh dari perhitungan penjumlahan satuan pendidikan vokasi dengan pembelajaran berkualitas, jumlah satuan pendidikan yang mengimplementasikan 8+i, dan jumlah satuan pendidikan yang memiliki kerjasama dengan dunia kerja, diperoleh hasil sebanyak 18.431 satuan pendidikan, kemudian dibagi dengan jumlah satuan pendidikan sebanyak 28.919 satuan pendidikan, sehingga mendapatkan capaian sebesar 63,37%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 62,34%, capaian ini mengalami peningkatan sebesar 1,03%. Capaian ini pun telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 62,35%, atau mencapai 101,6%. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebesar 60%, capaian ini telah mencapai 105,6%.

[IKP 2.4] Persentase Capaian 102,21%



Gambar 3.30 Grafik Perbandingan Capaian 2023, Target 2024 dan Capaian 2024, dan Target Akhir Renstra

Dokumentasi kegiatan

Berikut ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung capaian IKP 2.4



Gambar 3.31 Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BT Batik Trust dan Satuan Pendidikan



Gambar 3.32 Pelaksanaan *Upskilling* dan *Reskilling* Pendidik Pelatihan Pengukur Kecepatan Motor di BBPPMPV BMTI



Gambar 3.33 Pelaksanaan *Upskilling* dan *Reskilling* Pendidik Pelatihan Sistem Informasi Geografis di BBPPMPV BMTI



Gambar 3.34 Pelaksanaan *Upskilling* dan *Reskilling* Instruktur Kursus dan Pelatihan Perikanan di BBPPMPV Pertanian

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Penandatanganan 334 kesepakatan dokumen kerjasama satuan pendidikan dengan mitra industri.
2. Pendidik dan tenaga kependidikan yang mengikuti *upskilling* dan *reskilling* berstandar industri dilaksanakan oleh BBPPMPV/BPPMPV sebanyak 17.687 orang, dengan rincian
 - Bidang Bangunan dan Listrik sebanyak 2.594 orang
 - Bisnis dan Pariwisata sebanyak 3.366 orang
 - Bidang Mesin dan Teknologi Industri sebanyak 2.427 orang
 - Bidang Otomotif dan Elektronika sebanyak 4.225 orang
 - Kelautan, Perikanan dan TIK sebanyak 1.127 orang
 - Pertanian sebanyak 1.413 orang
 - Seni dan Budaya sebanyak 2.535 orang
3. Instruktur kursus yang mendapatkan kompetensi industri bidang keahlian teknologi terapan yang dilaksanakan oleh BBPPMPV/BPPMPV sebanyak 386 orang, dengan rincian
 - Bidang Bangunan dan Listrik sebanyak 74 orang
 - Bisnis dan Pariwisata sebanyak 50 orang
 - Bidang Mesin dan Teknologi Industri sebanyak 63 orang
 - Bidang Otomotif dan Elektronika sebanyak 60 orang
 - Kelautan, Perikanan dan TIK sebanyak 46 orang
 - Pertanian sebanyak 46 orang
 - Seni dan Budaya sebanyak 46 orang
4. Model pembelajaran vokasi yang dikembangkan BBPPMPV/BPPMPV dengan mitra dunia kerja, dengan total model pembelajaran sebanyak 40 model, dengan rincian
 - Bidang Bangunan dan Listrik sebanyak 8 model
 - Bisnis dan Pariwisata sebanyak 4 model
 - Bidang Mesin dan Teknologi Industri sebanyak 4 model
 - Bidang Otomotif dan Elektronika sebanyak 6 model
 - Kelautan, Perikanan dan TIK sebanyak 5 model
 - Pertanian sebanyak 5 model
 - Seni dan Budaya sebanyak 8 model

Faktor penyebab keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja antara lain:

1. Program ekosistem kemitraan yang diselenggarakan dengan dukungan pendanaan dari LPDP. Program ini mendukung terbentuknya kerjasama antara satuan pendidikan dengan DUDI yang semula dilakukan melalui pendampingan *head to head* menjadi dilakukan secara masif melalui pembentukan ekosistem kemitraan berbasis kompetensi daerah.
2. Kolaborasi antara BBPPMPV/BPPMPV dengan industri diantaranya berbagi fasilitas, SDM, serta pembiayaan sehingga dapat mencapai sasaran yang melebihi target. Selain itu dilakukan juga peningkatan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, Sekolah, dan pihak LKP.
3. Mengoptimalkan *database* calon peserta pelatihan yang dilakukan sebelum pendaftaran, serta penyediaan aplikasi pendaftaran yang *user friendly* sehingga memudahkan proses pendaftaran dan akses informasi pelatihan *upskilling* dan *reskilling*.
4. BBPPMPV/BPPMPV telah mempunyai fasilitator/widyaiswara yang telah memiliki kompetensi profesional sesuai dengan bidang keahlian yang diampu, sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan industri, kurikulum yang sudah disinkronisasi dengan industri, serta telah mempunyai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah sesuai dengan standar BNSP.
5. Memanfaatkan fasilitas sekolah sebagai pusat belajar baik sarana dan prasarana maupun SDM yang ada di sekolah sebagai pusat belajar.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Industri perlu waktu untuk memilih satuan pendidikan vokasi yang akan dijadikan mitra, yaitu sesuai dengan bidang dan kebutuhan CAKRA.
2. Pembaharuan kurikulum sering membutuhkan sumber daya infrastruktur yang signifikan untuk penyediaan materi, peralatan, pelatihan guru, dengan spesifikasi server dan instalasi LMS yang memadai. Keterbatasan anggaran pun menjadi hambatan yang signifikan dalam penyusunan kurikulum yang memadai.
3. Salah satu tagihan dalam kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Pengawas adalah adanya dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan dokumen RTL seringkali terlambat dalam penyelesaian sehingga memperlambat proses penilaian oleh pengajar.
4. Pada penyusunan dokumen kerjasama sering kali ditemukannya kesalahan dalam

penulisan sehingga kembali membutuhkan waktu untuk perbaikan draf dokumen kerjasama tersebut.

5. Pada pelaksanaan pelatihan untuk pengawas SMK terjadi kekurangan peserta karena untuk wilayah Papua jumlah pengawas SMK sangat sedikit dan beberapa belum dilantik.
6. Penetapan sasaran satuan pendidikan yang akan didampingi bidang kurikulum dan penjaminan mutu mengalami keterlambatan karena harus menunggu penetapan SMK PK.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Melakukan komunikasi yang intensif dengan CAKRA untuk memberikan pendampingan dalam pemilihan satuan pendidikan vokasi.
2. Pengalokasian infrastruktur yang memadai dilakukan dengan menyusun rencana anggaran yang sesuai untuk mendukung infrastruktur implementasi kurikulum yang baru, termasuk untuk pembelian materi ajar, peralatan, pelatihan guru, dan infrastruktur pendukung lainnya.
3. Mengusulkan agar RTL tidak lagi menjadi bagian dari dokumen penilaian sehingga lebih mempercepat proses penilaian.
4. Melakukan koordinasi dan pendampingan secara berkala kepada setiap sekolah dalam penyusunan dokumen perjanjian kerjasama melalui daring.
5. Mengganti pelatihan pengawas SMK dengan pelatihan peningkatan kapabilitas kepala sekolah.
6. Menambah sasaran dari SMK PK yang belum mendapatkan pelatihan *upskilling* dan *reskilling*, dan melakukan penyesuaian alokasi anggaran.

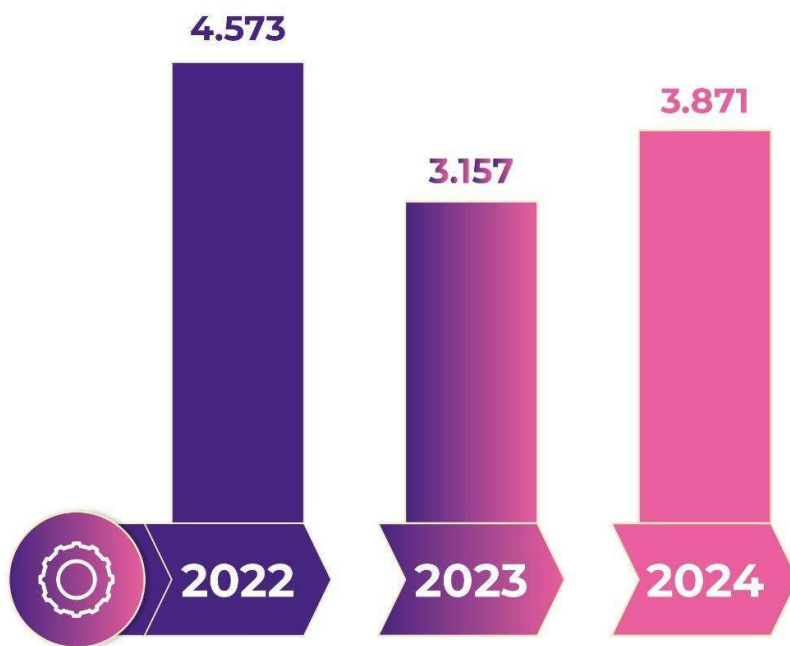
Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Keberlanjutan program ekosistem kemitraan melalui program katalisator kemitraan berdikari. Program ini menjadi implementasi *innovation planning* yang dihasilkan program ditahun pertama sehingga usulan harus sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. *Tracer study* menjadi program yang dilaksanakan secara organik dan berkelanjutan pada satuan pendidikan vokasi sebagai implementasi penjaminan mutu satuan pendidikan vokasi.
3. Penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia kerja secara organik

- dilaksanakan oleh satuan pendidikan vokasi bersama dengan industri mitra untuk mengidentifikasi kompetensi, pembelajaran, dan kurikulum yang dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga lulusan pendidikan vokasi akan selaras atau relevan dengan kebutuhan industri atau keunggulan wilayah.
4. Hasil dari inovasi pembelajaran atau *teaching factory* yang dilaksanakan di BBPPMPV/BPPMPV dimanfaatkan sebagai bahan ajar pada pelatihan selanjutnya serta digunakan sebagai output pada proses pembelajaran di sekolah.
 5. Mengoptimalkan kerjasama dengan industri mulai dari penyelarasan kurikulum, magang industri, sampai dengan pendampingan pasca magang.
 6. Melakukan peningkatan kompetensi SDM internal maupun eksternal, melalui pelatihan, magang industri, ataupun sertifikasi kompetensi, serta mengoptimalkan sarana dan prasarana yang tersedia di BBPPMPV/BPPMPV.
 7. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mendapatkan sumber data terkait Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) terutama untuk bidang keahlian yang memang sulit untuk ditemukan.
 8. Melakukan pengkajian ulang terhadap strategi pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi kurikulum, konsep pelatihan dan kondisi anggaran, melalui berbagai metode baik daring maupun luring serta kombinasi.

Sasaran Program 3. Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi

Sampai dengan tahun 2024, riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebagaimana terlihat pada grafik berikut,



Gambar 3.35 Grafik Trend capaian 2022-2024

Strategi yang dilakukan untuk mencapai sasaran program ini diantaranya dengan memberikan intensif kepada dosen/peneliti serta pemberian bantuan pemerintah untuk pelaksanaan riset melalui program *matching fund*.

IKP 3.1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat

Luaran penelitian yang dimaksudkan dalam indikator ini meliputi karya tulis ilmiah, karya terapan, dan karya seni. Kriteria penerapan di masyarakat yaitu:

1. Karya Ilmiah

Jurnal ilmiah, buku akademik, dan bab (*chapter*) dalam buku akademik dipakai oleh pemerintah, perusahaan, atau organisasi luar dan diterapkan dalam sebuah proyek atau kegiatan; hasil penelitian dipakai sebagai bahan mengajar oleh dosen lain; atau buku berhasil diterbitkan dengan skala distribusi tingkat nasional.

2. Karya Terapan

Produk fisik, digital, dan algoritma (termasuk *prototipe*) mendapat paten nasional, mendapat pengakuan asosiasi, dipakai oleh industri/perusahaan atau lembaga pemerintah/non pemerintah; atau terdapat kemitraan antara investor dan perusahaan atau organisasi pemerintah/non pemerintah berskala nasional; dan - pengembangan invensi dengan mitra didanai oleh, dikembangkan bersama dengan, atau digunakan oleh industri di dalam negeri.

3. Karya Seni

Karya Visual, Audio, Audio-visual, atau pertunjukan merupakan karya asli, dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional, dan diakuisisi oleh industri atau pemerintah; Desain konsep, desain produk, desain komunikasi visual, desain arsitektur, desain kriya merupakan karya asli, dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi di daerah maupun nasional, dan diakuisisi oleh industri atau pemerintah;

Karya tulis novel, sajak, puisi, notasi musik merupakan karya asli, karya dipublikasikan/didiskusikan di festival atau acara pertunjukan berskala nasional, karya diterbitkan, baik oleh penerbit akademik maupun penerbit komersial yang bereputasi; atau karya dibiayai oleh industri atau pemerintah; dan

Karya preservasi mendapat *sponsorship*/pendanaan dari organisasi nonpemerintah, dipublikasikan dalam pameran atau pertunjukan resmi nasional, atau karya diakuisisi atau dibiayai oleh sektor privat atau industri atau pemerintah.

Formula perhitungan untuk IKP 3.1 adalah dengan menghitung jumlah penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat Satuan yang digunakan adalah karya dengan metode perhitungan non kumulatif.

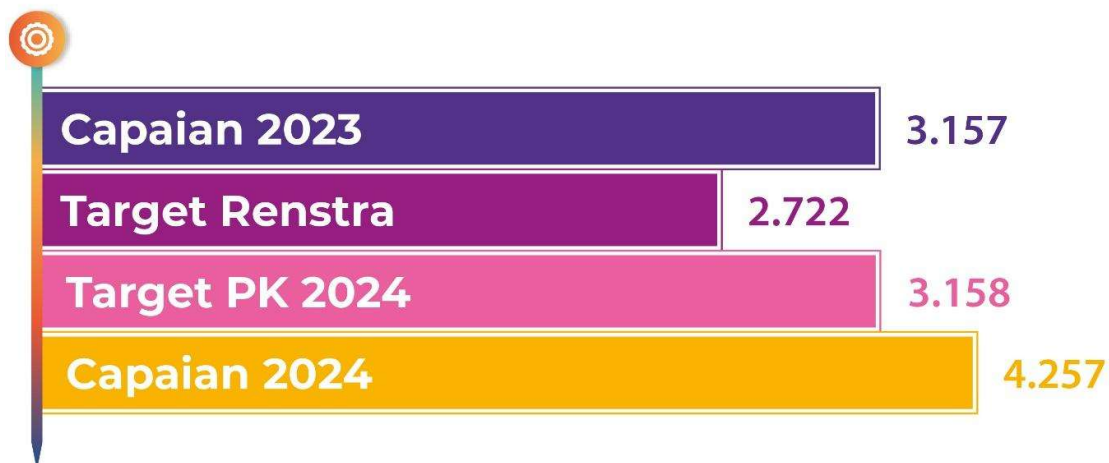
Indikator Kinerja Program	Capaian 2023	Tahun 2024			Realisasi s.d Tahun 2024 (Akumulasi)	Target Akhir Renstra 2024 (Akumulasi)	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%			
Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	3.157	3.158	4.257	134,8	15.489	11.341	136,7

Capaian IKP 3.1 pada tahun 2023 yaitu sebanyak 3.157 karya, sedangkan capaian tahun 2024 dengan penarikan data per tanggal 4 Desember 2024 sebanyak 4.257 karya, maka capaian mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 1.100 karya. Capaian tersebut juga melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebanyak 3.158 karya, dengan persentase sebesar 134,8%. Ketercapaian target tidak lepas dari dukungan Perguruan Tinggi Vokasi yang mendaftarkan Kekayaan Intelektual yang didanai oleh perguruan tinggi (mandiri), tidak hanya mengandalkan dana insentif dari Direktorat Teknis.

Kemudian untuk membandingkan capaian terhadap target akhir renstra tahun 2024, perlu menjumlahkan capaian dari awal tahun renstra sampai dengan tahun berjalan. Maka, capaian pada IKP 3.1 sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak

15.489 karya, dengan rincian, baseline di tahun 2020 sebanyak 2.270 karya, capaian di tahun 2021 sebanyak 1.232 karya, capaian 2022 sebanyak 4.573 karya, dan capaian 2023 sebanyak 3.157 karya. Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebanyak 11.341 karya, IKP ini telah tercapai sebesar 136,7%.

[IKP 3.1] Persentase Capaian 134,8%



Gambar 3.36 Grafik Perbandingan Capaian 2023, Target 2024 dan Capaian 2024, dan Target Akhir Renstra

Dokumentasi kegiatan

Berikut ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung capaian IKP 3.1



Gambar 3.37 Ujicoba Alat Hasil dari Bantuan Inovokasi di PPNS



Gambar 3.38 Alat Hasil dari Program MF di Politeknik Negeri Semarang



Gambar 3.39 Penelitian Kerjasama pada Program A3 Tematik



Gambar 3.40 Alat Hasil dari Program MF di PENS



Gambar 3.41 Seminar Hasil pada Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Perguruan Tinggi Vokasi Penerima Bantuan Pendanaan *Matching Fund*/Hilirisasi Produk Penelitian Terapan yang merupakan program yang memberikan bantuan untuk mendorong kerjasama/kolaborasi yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dan mitra berbasis riset atau kepakaran perguruan tinggi untuk menyelesaikan masalah DUDI atau pemberdayaan masyarakat, dengan lembaga penerima yang telah ditetapkan melalui SK sebanyak 238 proposal.
2. Program Kerja Sama Pengembangan Produk Inovasi Tematik (A3 Tematik) merupakan kegiatan penelitian dan pengembangan produk inovasi bersama mitra PT/Litbang dalam atau luar negeri dan mitra DUDI yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam menjawab tantangan baru (*emerging challenges*). Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk kemitraan atau kerja sama antar perguruan tinggi yang dapat berorientasi kepada penjelasan atau penemuan (invensi) guna mengantisipasi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung program prioritas nasional di bidang perubahan iklim (*climate change*) seperti energi baru terbarukan, biomaterial, material maju, pengembangan baterai listrik, transisi energi, dan topik terkait lainnya yang relevan. Program Dana Padanan A3 Tematik disalurkan kepada 24 perguruan tinggi dengan total keluaran sebanyak 39 judul.
3. Program Dana Padanan untuk Inovasi Kreatif untuk Mitra Vokasi (Inovokasi) yang merupakan kegiatan pembinaan dan Penguatan usaha untuk level mikro, termasuk BUMDES, IRT dan kelompok usaha produktif yang dilakukan perguruan

tinggi dalam rangka mendorong terjadinya kerjasama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Kerjasama ini merupakan salah satu bentuk hilirisasi inovasi atau kepakaran dosen vokasi melalui pemanfaatan hasil penelitian dan atau kepakaran yang dimiliki perguruan tinggi untuk membantu menyelesaikan permasalahan mitra vokasi. Adapun bentuk kontribusi perguruan tinggi dalam kerjasama pembinaan dan penguatan usaha mitra vokasi meliputi pemberdayaan mitra atau peningkatan produktivitas melalui literasi digital, penerapan teknologi, serta pelatihan dan pendampingan mitra penerima manfaat yang terintegrasi dalam pembelajaran. Program Dana Padanan skema Inovasi untuk Mitra Vokasi (Inovokasi) industri mikro dan industri rumah tangga disalurkan kepada 56 perguruan tinggi dengan total keluaran sebanyak 107 judul.

4. Program insentif artikel ilmiah dan kekayaan intelektual dosen vokasi adalah program pemberian insentif kepada peneliti/dosen vokasi atas pencapaian publikasi artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dan pengakuan atas perolehan KI baik yang sudah maupun belum digunakan masyarakat/industri. Pemberian insentif artikel ilmiah dan kekayaan intelektual perguruan tinggi vokasi yang difasilitasi untuk publikasi dan didaftarkan dengan rincian artikel ilmiah sebanyak 153 judul dan kekayaan intelektual sebanyak 354 judul.
5. Program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan program pendanaan untuk membiayai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi penyelenggara program pendidikan vokasi yang bersifat stimulus dalam rangka mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam mengemban amanahnya melaksanakan tridharma yang terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Aktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Pemberian bantuan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan total keluaran sebanyak 1.274 judul.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Komponen penilaian administrasi dan substansi di aplikasi BIMA belum stabil, sehingga beberapa reviewer mengalami kendala dalam penilaian.

2. Jumlah usul proposal belum terlalu banyak, disebabkan pengusul membutuhkan waktu untuk melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai riset yang akan dilakukan, serta diperlukan waktu untuk menyepakati dokumen kerjasama kegiatan antar kampus/lembaga.
3. Beberapa penerima pendanaan yang digunakan untuk pengadaan perangkat TIK terkendala terkait izin *clearance*.
4. Belum adanya kesepakatan jadwal antara tim Direktorat APTV dan DJKI dalam pelaksanaan kegiatan bimtek penyusunan dokumen paten sehingga bimtek baru bisa dilaksanakan di akhir tahun.
5. Mekanisme pemenuhan dokumen pencairan dana bantuan pada setiap PT berbeda sehingga dimungkinkan terjadi keterlambatan penyaluran dana kepada penerima yang akan berpengaruh kepada pelaksanaan kegiatan.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Menyarankan reviewer untuk membuat *backup* penilaian proposal diluar aplikasi BIMA.
2. Menerapkan relaksasi waktu pemenuhan persyaratan pada dokumen kerja sama bersama mitra PT luar negeri saat pendaftaran, dimana dapat disampaikan tanpa mencantumkan kontribusi dana padanan, tetapi wajib dipenuhi apabila proposal telah ditetapkan menjadi penerima dana.
3. Mendorong unit pengelola Dana Padanan di perguruan tinggi untuk berkoordinasi lebih lanjut terkait izin *clearance*.
4. Menyelenggarakan secara swakelola, daftar peserta bimtek paten yang sudah final dan tinggal mengeluarkan surat undangan peserta.
5. Koordinasi intensif dengan unit pengelola untuk dapat memenuhi dokumen pencairan segera agar tidak menghambat pelaksanaan kegiatan penerima.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Identifikasi dan memprioritaskan kebutuhan mendesak peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat terkait aplikasi BIMA. Fokus pada fitur-fitur kritikal yang harus segera diimplementasikan atau dipulihkan setelah pemisahan.
2. Menyusun rencana transisi yang detail dan terukur, mencakup jadwal, *milestone*, dan penanggung jawab. Rencana ini harus dikomunikasikan secara transparan kepada seluruh pihak terkait.

3. Melakukan pelatihan dan sosialisasi yang komprehensif kepada tim LPPM tentang prosedur dan format pelaporan money internal ke aplikasi BIMA, dan memastikan tim memahami dengan baik cara menggunakan aplikasi dan mengisi data yang diperlukan.
4. Menyediakan pendampingan dan bantuan bagi peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pelaporan, misalnya melalui *workshop* atau konsultasi.

Sasaran Program 4. Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi

Sampai dengan tahun 2023, akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi mendapatkan predikat yang sama dengan tahun sebelum-sebelumnya, namun pada tahun 2024 ini predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi meningkat menjadi predikat AA, sebagaimana terlihat pada tabel berikut,



Gambar 3.42 Capaian Nilai SAKIP Tahun 2022-2024

Strategi yang dilakukan untuk peningkatan capaian ini diantaranya berkoordinasi dengan biro perencanaan terkait kelengkapan dokumen SAKIP dan penilaian SAKIP yang sesuai dengan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021.

IKP 4.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi



Gambar 3.43 Grafik Perbandingan Nilai Angka SAKIP Ditjen Vokasi Tahun 2022-2024

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Evaluasi SAKIP pada tahun 2022 dilakukan dengan evaluasi mandiri didampingi Biro Perencanaan yang kemudian direviu oleh evaluator dari Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek. Evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Spasikita dengan menggunakan Lembar Hasil Evaluasi (LHE) yang berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Formula perhitungan pada IKP 4.1 ini dengan menjumlahkan nilai pada masing-masing komponen SAKIP yaitu nilai perencanaan kinerja, nilai pengukuran kinerja, nilai pelaporan kinerja, dan nilai evaluasi kinerja. Lembar Hasil Evaluasi (LHE) dapat diunduh pada aplikasi Spasikita setelah dilakukan revidi dan ditandatangani oleh Inspektur Jenderal, Kemendikbudristek. Satuan dari IKP ini adalah predikat dengan klasifikasi sebagai berikut

Tabel 3.3 Klasifikasi Predikat SAKIP

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

$$\text{Realisasi IKP} = [\text{Perencanaan Kinerja}] + [\text{Pengukuran Kinerja}] + [\text{Pelaporan Kinerja}] + [\text{Evaluasi Kinerja}]$$

Indikator Kinerja Program	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	A	A	AA	113	A	113

Capaian IKP 4.1 pada tahun 2024 yaitu predikat AA dengan nilai 90,65. Berikut rincian nilai pada masing-masing komponen SAKIP,

Tabel 3.4 Rincian Nilai pada masing-masing Komponen SAKIP

Komponen	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja 2024
Perencanaan Kinerja	30%	27
Pengukuran Kinerja	30%	26,1
Pelaporan Kinerja	15%	13,8
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	23,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja	AA	90,65

Secara predikat capaian ini mengalami peningkatan dimana tahun sebelum-sebelumnya mendapatkan predikat A dan di tahun 2024 mendapatkan predikat AA. Jika kita bandingkan dengan target akhir renstra 2024, capaian IKP ini sudah melebihi target.

Dokumentasi kegiatan

Berikut ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung capaian IKP 4.1



Gambar 3.44 Asistensi SAKIP di Politeknik Negeri Samarinda



Gambar 3.45 Asistensi SAKIP di Politeknik Negeri Bengkalis



Gambar 3.46 Pengukuran Kinerja Triwulan II Ditjen Pendidikan Vokasi



Gambar 3.47 Masa Sanggah Nilai Evaluasi Sakip sementara bersama Itjen

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Penyusunan Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi dan pimpinan satker di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2024, Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja dan penyusunan tindak lanjut LHE tahun 2023.
2. Melakukan pengukuran kinerja setiap triwulan Ditjen Pendidikan Vokasi serta mendorong semua satker untuk melakukan pengisian pengukuran kinerja sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.
3. Menyampaikan hasil analisa dan laporan hasil evaluasi AKIP kepada pemangku kepentingan untuk ditindaklanjuti.
4. Melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan kerja Politeknik/AKN untuk melakukan revisi renstra dengan mengacu pada Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan LLDIKTI di lingkungan Kemendikbudristek serta penambahan Indikator Zona Integritas pada Renstra Politeknik/AKN.
5. Pelaksanaan Asistensi SAKIP kepada semua satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi yang mendapatkan predikat SAKIP BB ke bawah.
6. Melakukan pemenuhan semua dokumen SAKIP dalam rangka persiapan penilaian mandiri AKIP serta mendampingi satuan kerja di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.
7. Melaksanakan sosialisasi evaluasi AKIP Internal kepada seluruh satuan kerja dan pelaksanaan evaluasi mandiri AKIP eselon 1 yang dilakukan oleh Tim Evaluator SAKIP Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi serta mendampingi evaluasi mandiri masing-masing satuan kerja.
8. Pelaksanaan masa sanggah nilai evaluasi SAKIP bersama evaluator dari Inspektorat Jenderal.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Masa transisi dari Kepmendikbud Nomor 3 tahun 2021 ke Kepmendikbudristek Nomor 210 tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sehingga PTN Vokasi memerlukan waktu untuk menyesuaikan dokumen terkait perencanaan dan evaluasi.
2. Adanya penambahan indikator Zona Integritas (ZI) pada Perjanjian Kinerja Direktur Politeknik/AKN sehingga perlu disusun formula dan definisi operasional

terkait ZI pada Renstra Politeknik/AKN.

3. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi perlu melakukan revisi renstra dalam waktu yang cukup singkat, sehingga diperlukan sosialisasi secara komprehensif dan menyeluruh.
4. Beberapa satker mengalami kendala dalam melakukan proses tanda tangan elektronik untuk dokumen dukung yang dinilai pada Evaluasi AKIP di aplikasi Spasikita.
5. Terlambatnya dalam melakukan penyusunan PK revisi tahun 2024 karena adanya penyesuaian terkait kebijakan efisiensi anggaran dan penambahan belanja pegawai.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

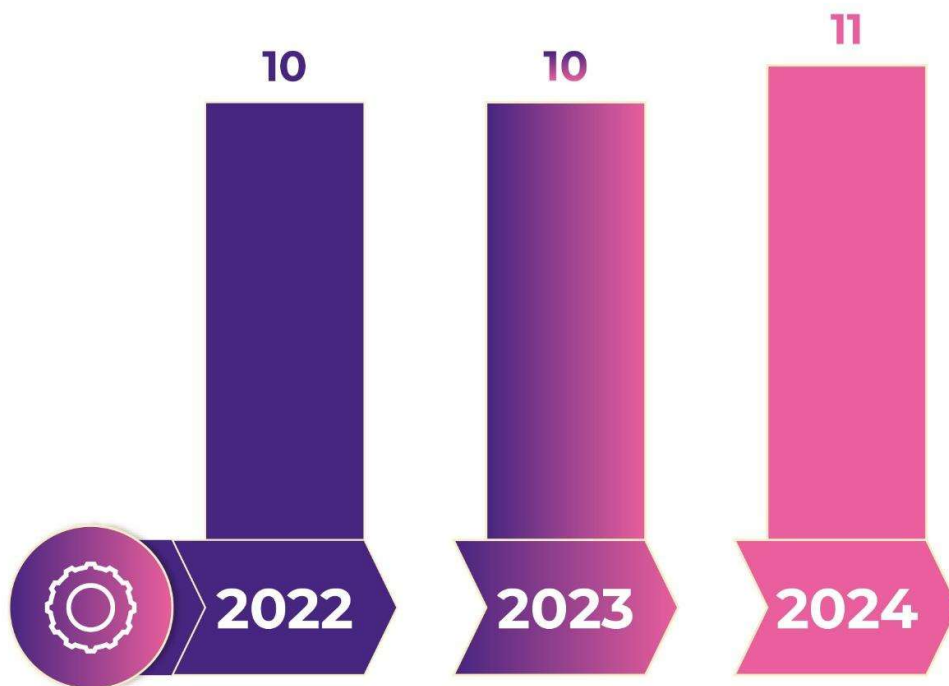
1. Melakukan sosialisasi kepada satuan kerja politeknik/AKN terkait dengan penyusunan PK, tindak lanjut LHE.
2. Menyusun formula dan definisi Indikator ZI dan mensosialisasikan kepada satuan kerja untuk kemudian dimuat ke renstra revisi politeknik/AKN.
3. Melakukan sosialisasi kepada satuan kerja PTN Vokasi untuk melakukan revisi renstra dengan mengacu pada Kepmendikbudristek nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan LLDikti.
4. Koordinasi dengan Pusdatin untuk penyelesaian proses tanda tangan elektronik pimpinan satker, terutama untuk pimpinan yang baru dan TTE yang *expired*, sementara dokumen yang disampaikan di aplikasi spasikita menggunakan dokumen yang bertanda tangan manual.
5. Perpanjangan waktu penyusunan PK revisi tahun 2024.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Komitmen Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dalam memenuhi dokumen Sakip.
2. Ketepatan waktu dalam menyusun perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporan kinerja.
3. Pelibatan semua satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk meningkatkan kualitas Sakip.
4. Pendampingan kepada semua satuan kerja dalam menyusun dokumen terkait dengan Sakip.

Sasaran Program 5. Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek

Sampai dengan tahun 2024, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2023, sebagaimana terlihat pada tabel berikut,



Gambar 3.48 Grafik Trend Capaian tahun 2022 - 2024

Peningkatan capaian ini dipengaruhi oleh strategi yang dilakukan diantaranya dengan melakukan pendampingan penilaian ZI WBK dan WBBM kepada satuan kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Vokasi.

IKP 5.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM sebagai berikut:

Tabel 3.5 Persyaratan penetapan Unit Kerja/Satuan Kerja menuju WBK/WBBM

Syarat	Menuju WBK	Menuju WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapat predikat menuju WBK
Nilai Minimal Pengungkit	40	48
Bobot Nilai Minimal per area pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	18,25	19,50
🗳️ Nilai Sub Komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi" minimal	15,75 (survei 3,60)	15,75 (survei 3,60)
🗳️ Nilai Sub komponen "Kinerja Lebih Baik" minimal	2,50	3,75
Nilai Komponen Hasil "Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel" minimal	14,00 (survei 3,20)	15,75 (survei 3,60)

Syarat satuan kerja yang dapat ditetapkan sebagai Zona Integritas WBK adalah:

1. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang berada di kawasan tersebut memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBK.
2. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja yang ada di kawasan tersebut. Skor integrasi proses bisnis minimal 6,5 untuk predikat WBK.

Syarat satuan kerja yang dapat ditetapkan sebagai Zona Integritas WBBM adalah:

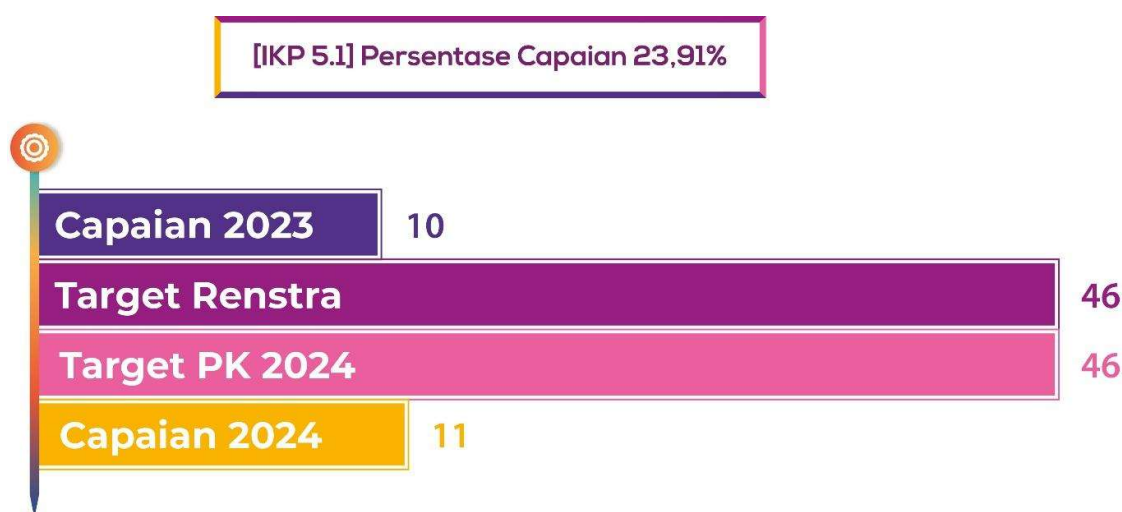
1. Satuan kerja tersebut telah mendapat predikat Kawasan Menuju WBK.
2. Semua Unit Kerja/ satuan kerja yang memenuhi kriteria unit berpredikat Menuju WBBM.
3. Sudah terdapat keterpaduan/integrasi ketatalaksanaan (proses bisnis) antar unit kerja/satuan kerja. Skor integrasi proses bisnis minimal 7,5 untuk predikat Menuju WBBM.
4. Memiliki inovasi layanan yang menyentuh masyarakat dan telah direplikasi oleh satuan kerja lain.

Penilaian dilakukan oleh Kemenpan RB dan hasil akan diumumkan pada bulan Desember setiap tahun. Formula perhitungan pada IKP ini adalah dengan menghitung jumlah satker yang ditetapkan oleh KemenPAN sebagai satker berpredikat ZI-WBK/WBBM dengan metode perhitungan kumulatif.

Indikator Kinerja Program	Capaian 2023	Tahun 2024			Target Akhir Renstra 2024	% Realisasi terhadap Target Akhir Renstra 2024
		Target	Realisasi	%		
Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM	10	46	11	23,91	46	23,91

Capaian IKP 5.1 sampai dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 9 satker menjadi WBK dan 2 satker menjadi WBBM. Satker yang mendapatkan predikat WBK adalah BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknologi Industri, BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik, BBPPMPV Bidang Bisnis dan Pariwisata, BBPPMPV Pertanian, BBPPMPV Seni dan Budaya, BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika, Politeknik Negeri Bandung, Politeknik Manufaktur Bandung, dan Politeknik Negeri Batam. Sedangkan satker yang mendapatkan predikat WBBM adalah BBPPMPV Bidang Otomotif dan Elektronika dan BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri. Ketidaktercapaian atas target dikarenakan tidak semua satker dilakukan verifikasi lapangan oleh KemenPAN RB dan tidak diberikan penjelasan karakteristik satker mana yang diverval.

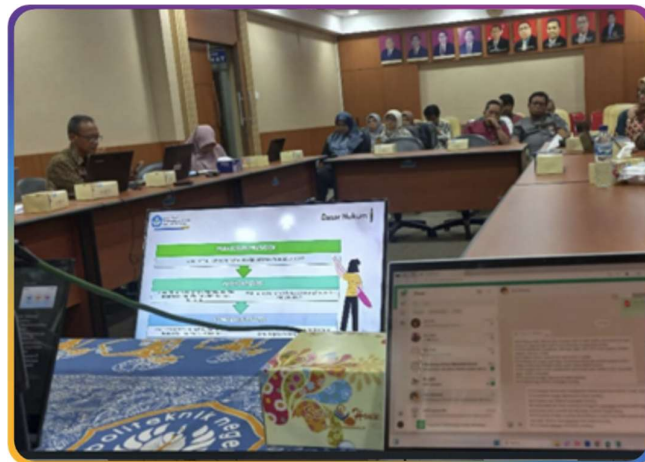
Jika dibandingkan dengan target akhir renstra tahun 2024 sebanyak 46 satker, maka untuk IKP ini baru mencapai 23,91%. Salah satu upaya strategi yang dilakukan untuk mencapai strategi tersebut adalah dengan memberikan pelatihan kepada asesor yang akan melakukan pendampingan kepada satuan kerja yang diusulkan menjadi satker WBK/WBBM dan memetakan kondisi real satuan kerja, sehingga mempermudah penilaian.



Gambar 3.49 Grafik Perbandingan Capaian 2023, Target dan Capaian 2024, dan Target Akhir Renstra

Dokumentasi kegiatan

Berikut ini adalah beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung capaian IKP 5.1



Gambar 3.50 Pendampingan Pelaksanaan ZI di Politeknik Negeri Ujung Pandang



Gambar 3.51 Pendampingan Pelaksanaan ZI di Politeknik Negeri Bali

Program/kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan antara lain:

1. Melakukan penambahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Perjanjian Kinerja Direktur Politeknik dan AKN, agar ZI WBK/WBBM dapat menjadi salah satu indikator yang diprioritaskan.
2. Bimtek dan pendampingan bersama asesor, dengan metode dibagi 3 termin, ini dilakukan dengan maksud agar pelaksanaan pendampingan dapat dilakukan dengan lebih maksimal dan fokus.
3. Pendampingan secara *hybrid* (luring dan daring) kepada 15 Satker tersebut untuk dapat memperbaiki pelaksanaan ZI, melakukan pengisian LKE dengan

menyesuaikan format LKE dari MenPAN-RB tahun 2024, serta telah melakukan evaluasi triwulan terkait pelaksanaan ZI.

4. Pendampingan kepada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang dinyatakan lolos ke TPN sebanyak 5 satuan kerja dari 15 satuan kerja yang diusulkan ke TPI, dengan rincian 3 satuan kerja yang diusulkan mendapat predikat WBBM dan 2 satuan kerja lainnya yang diusulkan mendapat predikat WBK.
5. Melakukan pendampingan dan asistensi penyusunan laporan wawancara WBK dan WBBM kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang telah dinyatakan lolos ke TPN.
6. Pendampingan persiapan verifikasi lapangan kepada 5 satuan kerja Ditjen Vokasi yang lolos ke TPI dan melakukan roleplay penyampaian paparan, capaian pelaksanaan ZI.

Hambatan/kendala/permasalahan/faktor penghambat yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Ditjen Pendidikan Vokasi belum menerima SK tim TPI Itjen, hal ini menyulitkan untuk berkoordinasi dengan TPI.
2. Informasi terkait perubahan LKE baru disampaikan oleh MenPAN RB dan Biro Ortala pada batas akhir pengusulan satker. Hal tersebut menyebabkan perbaikan yang dilakukan menjadi kurang maksimal.
3. Keterbatasan waktu asesor dan tidak semua asesor dapat meluangkan waktu untuk mendampingi satuan kerja karena tasi jabatan masing-masing dari asesor.
4. Pendampingan belum optimal karena para asesor memiliki penugasan lain di satuan kerja masing-masing.
5. Tidak semua satuan kerja dilakukan Verifikasi lapangan oleh Menpan RB, dan tidak dijelaskan karakteristik satker mana yang di verval.

Langkah antisipasi yang diambil untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Berkoordinasi dengan RB Kemendikbudristek agar dapat menjadi narahubung kepada TPI yang mendampingi Ditjen Pendidikan Vokasi.
2. Meminta tambahan waktu kepada TPI Itjen.
3. Asesor dari Tim Tata Laksana Ditjen Pendidikan Vokasi membantu pelaksanaan

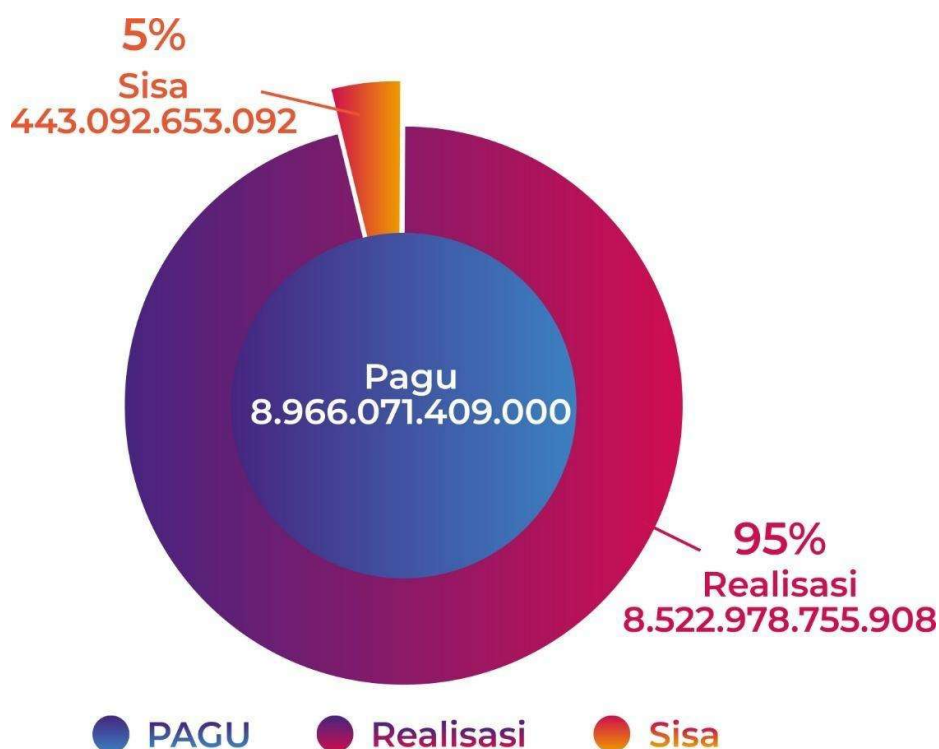
- asesmen terkait pelaksanaan ZI terhadap satker yang belum sempat diberikan asesmen oleh asesor internal Ditjen Pendidikan Vokasi yang lain.
4. Melakukan pendampingan secara daring dengan membagi satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menjadi beberapa sesi sesuai dengan ketersediaan waktu.
 5. Pendampingan semua satuan kerja untuk persiapan verifikasi lapangan, dengan mempersiapkan indikator yang akan dilihat oleh verifikator ketika melaksanakan verlap. Indikator dibuat berdasarkan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya.

Strategi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai antara lain:

1. Mengadakan monitoring khusus kepada masing-masing satker terkait pengisian Laporan Kerja Evaluasi (LKE) untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang dimasukkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan monitoring ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat akurasi dan kelengkapan data yang telah diinput dalam LKE, serta memberikan bimbingan kepada satker.
2. Menjalinkan komunikasi dan koordinasi antara tim asesor dengan satker untuk membahas berbagai aspek teknis dan substansial yang perlu diperhatikan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang sama mengenai ketentuan pengisian LKE dan mengatasi potensi kesalahan data yang dapat mempengaruhi hasil evaluasi.

B. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Ditjen Pendidikan Vokasi tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja revisi adalah sebesar Rp8.966.071.409.000,- dan terealisasi sebesar Rp8.522.978.755.908,- dengan persentase 95%. Pagu tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 5 (lima) SP dengan 8 (delapan) IKP yang terdistribusi ke 62 (lima puluh sembilan) satker, yaitu 5 (lima) satker Pusat, 49 (empat puluh tujuh) Politeknik dan AKN, dan 7 (tujuh) Balai/Balai Besar.



Grafik Realisasi Anggaran Tahun 2024

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran per IKP (dalam ribuan)

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	%
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	1.1 Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	452.468.851	428.942.251	94,80
2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	2.1 Persentase lulusan SMK yang bekerja / berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	1.656.828.991	1.637.615.150	98,90
		2.2 Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	2.991.119.145	2.680.097.728	89,77
		2.3 Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	388.372.307	376.078.208	96,83
		2.4 Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	562.647.745	547.908.422	97,38
3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	3.1 Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	274.363.263	258.070.369	94,06
4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	4.1 Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	1.320.135.554	1.297.133.314	98,55
5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	5.1 Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM)	1.320.135.553	1.297.133.314	98,55
Jumlah			8.966.071.409	8.522.978.756	95,06

C. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2024, Ditjen Pendidikan Vokasi telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp121.063.997.000. Efisiensi disebabkan oleh adanya kebijakan blokir *Automatic Adjustment* (AA) dari beberapa kegiatan, dengan rincian sebagai berikut,

1. Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan efisiensi sebanyak Rp10.347.443.000.
2. Pembinaan Kursus dan Pelatihan efisiensi sebanyak Rp10.740.393.000.
3. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi efisiensi sebanyak Rp97.730.195.000.
4. Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi efisiensi sebanyak Rp2.245.966.000.

D. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi adalah bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan. Adapun langkah-langkah kerja yang telah dilakukan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan yaitu Program Kecakapan Kerja (PKK) dan Program Kecakapan Wirausaha (PKW) yang dilaksanakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan.
2. Pada akhir tahun anggaran 2024 terserap sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Anggaran	Realisasi	%
Program Kecakapan Kerja (PKK)	Rp. 219.516.150.000,-	51.939 Orang	99,9 %
Program Kecakapan Wirausaha (PKW)	Rp. 130.555.500.000,-	21.847 Orang	100 %

3. Mengisi instrumen evaluasi reformasi birokrasi tematik setiap triwulan sehingga dapat diketahui masalah, penyebab, rencana tindak lanjut dan rekomendasi dari Tim Penilai Internal (TPI).
4. Mengisi Portal Reformasi Birokrasi setiap triwulan untuk mengunci hasil setiap triwulannya.
5. Nilai indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi adalah sebesar 84,52.

Melalui upaya ini, diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

E. Informasi Capaian Kinerja Lainnya yang mendukung

Pada tahun 2024 terdapat capaian kinerja lainnya yang mendukung ketercapaian indikator kinerja. Ketercapaian terkait program pengentasan kemiskinan ekstrim sebagai berikut:

- a. Program SMK yang Mengembangkan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan
Pemanfaatan alokasi bantuan program SMK yang mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan diberikan kepada SMK yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan juknis yang telah ditetapkan. Alokasi pengelolaan program dimanfaatkan untuk persiapan, bimbingan teknis, fasilitasi SMK yang mengembangkan proyek kreatif dan kewirausahaan, serta Supervisi. Dampak yang dihasilkan adalah 1) jumlah lulusan penerima program yang berwirausaha meningkat tiap tahunnya; 2) mitra UMKM yang bekerja sama setiap tahun terus mengalami peningkatan; 3) Kepala Sekolah mendorong ekosistem sekolah inovatif yang mendukung akses kewirausahaan; 4) pembelajaran kewirausahaan telah menerapkan kaidah pembelajaran yang mampu membentuk jiwa dan inspirasi untuk menumbuhkan minat wirausaha; 5) siswa

telah memanfaatkan media promosi berbasis digital dengan sasaran konsumen yang luas.

b. Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)

Pemanfaatan alokasi bantuan program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) diberikan untuk anak usia sekolah tidak sekolah memperoleh pendidikan kecakapan kerja. Alokasi pengelolaan program dimanfaatkan untuk penyusunan dan penggandaan pedoman/kurikulum dan bahan ajar, sosialisasi/koordinasi penyelenggara program PKK, penilaian dan penetapan proposal penyelenggara program PKK, bimbingan teknis penyelenggaraan program PKK, monitoring, evaluasi dan supervisi program bantuan PKK, verifikasi dan pengolahan laporan, manajemen dukungan pengelolaan program bantuan, penyusunan, penggandaan dan sosialisasi *best practice* PKK. Dampak yang dihasilkan adalah 1) kompetensi yang mampu dalam mengembangkan diri sesuai dengan permintaan pasar kerja; 2) melalui uji kompetensi lulusan memiliki standar kompetensi yang relatif baik; 3) meningkatkan perbaikan taraf kehidupan keluarga penerima manfaat; 4) lulusan mempunyai penghasilan yang lebih baik.

c. Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW)

Pemanfaatan alokasi bantuan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) diberikan untuk anak usia sekolah tidak sekolah memperoleh pendidikan kecakapan wirausaha. Alokasi pengelolaan program dimanfaatkan untuk penyusunan dan penggandaan pedoman/kurikulum dan bahan ajar, sosialisasi/koordinasi penyelenggara program PKW, penilaian dan penetapan proposal penyelenggara program PKW, bimbingan teknis penyelenggaraan program PKW, monitoring, evaluasi dan supervisi program bantuan PKW, verifikasi dan pengolahan laporan, manajemen dukungan pengelolaan program bantuan, penyusunan, penggandaan dan sosialisasi *best practice* PKW. Dampak yang dihasilkan adalah 1) sebagian besar lulusan telah membuka usaha sendiri dengan didampingi oleh lembaga dan UMKM sebagai mitra; 2) setelah mengikuti program lulusan memiliki penghasilan yang lebih baik.

d. Program Organisasi Kemahasiswaan Membangun Negeri

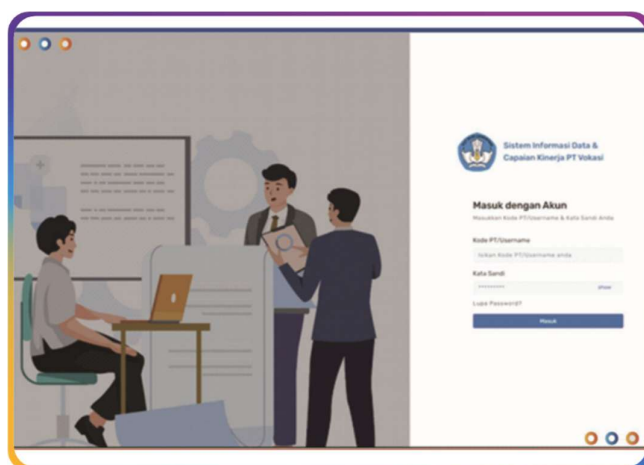
Pemanfaatan alokasi bantuan dimanfaatkan untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Alokasi pengelolaan program dimanfaatkan sebagaimana berikut: 1) meningkatkan kompetensi kelompok sasaran dalam

membangun desa; 2) meningkatkan kemitraan desa untuk keberlanjutan program; 3) menjadikan desa lokasi sebagai desa binaan kampus; 4) merintis pola pengabdian bersinambung dan berdampak. Dampak yang dihasilkan adalah 1) menumbuhkan kepedulian dan mengundang kontribusi mahasiswa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; 2) masyarakat desa mampu menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki untuk lebih berkembang dan bermanfaat sehingga dapat mewujudkan Indonesia adil dan makmur.

F. Inovasi

a. Aplikasi Sidakin

Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Data & Capaian Kinerja PT Vokasi (SIDAKIN) melalui aplikasi *sidakin.vokasi.kemdikbud.go.id* yang digunakan untuk untuk mengumpulkan, menyimpan, menghitung, dan menyajikan data capaian kinerja dari 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Vokasi. Tujuan dibuat aplikasi ini adalah untuk memudahkan pengelolaan dan pemantauan capaian IKU secara efisien dan terintegrasi. SIDAKIN menyediakan kemampuan untuk mengakses data dari berbagai sumber dan menyajikan dalam bentuk laporan yang mudah dipahami.



Gambar 3.52 Aplikasi Sistem Informasi Data dan Capaian Kinerja PT Vokasi (SIDAKIN)

b. Aplikasi Sikerma

Sistem Informasi Manajemen Kerjasama (SIKERMA) DUDI Dengan Satuan Pendidikan Vokasi, merupakan aplikasi pendataan terkait kerja sama antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan Mitra Kerja sama baik dari Dunia Usaha maupun Dunia Industri. Outcome dari aplikasi Sikerma menyajikan data terkait

kerjasama antara Satuan Pendidikan Vokasi dengan Mitra Kerjasama baik dari Dunia Usaha maupun Dunia Industri dan digunakan untuk dasar pengambilan kebijakan. Aplikasi ini dapat diakses melalui *sikerma.vokasi.kemdikbud.go.id*.



Gambar 3.53 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kerjasama (SIKERMA)

G. Penghargaan



Gambar 3.54 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan *Gold Winner* Kategori *Press Gathering* dan *Silver Winner* Kategori *Press Release* pada ajang *Media Relations Awards*



Gambar 3.55 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan *Gold Winner* Kategori PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Subkategori PPID Pelaksana dan *Silver Winner* Kategori Program Kehumasan Pemerintah Subkategori Kementerian pada ajang Anugerah Humas Indonesia



Gambar 3.56 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan *Gold Winner* Kategori *Owned Media Subkategori E-Magazine* pada ajang *Public Relations Indonesia Awards*



Gambar 3.57 Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi mendapatkan *Gold Winner* Kategori Media Sosial Pemerintah Terbaik pada ajang *Indonesia Digital Media Awards*



Gambar 3.58 BBPPMPV BMTI mendapatkan Predikat Satker WBBM dari KemenPAN RB



Gambar 3.59 Dit. Mitras DUDI mendapatkan Peringkat III Transaksi Digipay Satu Terbanyak dari KPPN Jakarta III



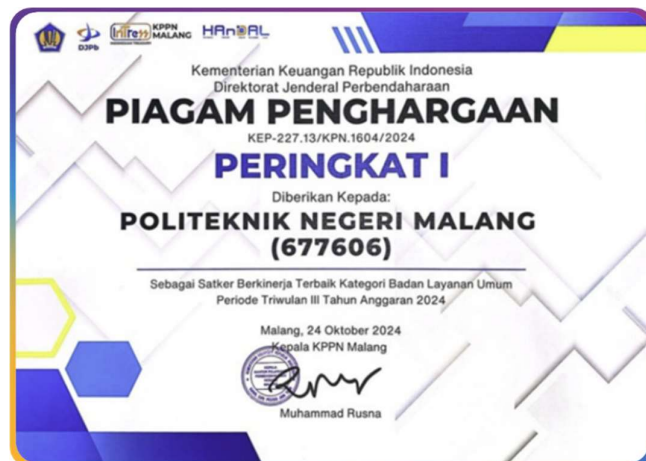
Gambar 3.60 BBPPMPV Pertanian mendapatkan Penghargaan sebagai Pembayar Pajak Terbaik dari Kanwil DJP Jawa Barat



Gambar 3.61 Dit. Kursus dan Pelatihan mendapatkan Peringkat II IKPA Terbaik dari KPPN Jakarta



Gambar 3.62 Politeknik Negeri Bali mendapatkan Peringkat I Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan UAKPA BLU dari Kanwil DJPB Bali



Gambar 3.63 Politeknik Negeri Malang mendapatkan Peringkat I Berkinerja Terbaik Kategori BLU Triwulan III dari DJPB Kemenkeu



Gambar 3.64 Politeknik Negeri Malang mendapatkan Ranking 497 Dunia



Gambar 3.65 AKN Aceh Barat mendapatkan IKPA Sangat Baik Semester I dari DJPB Kemenkeu

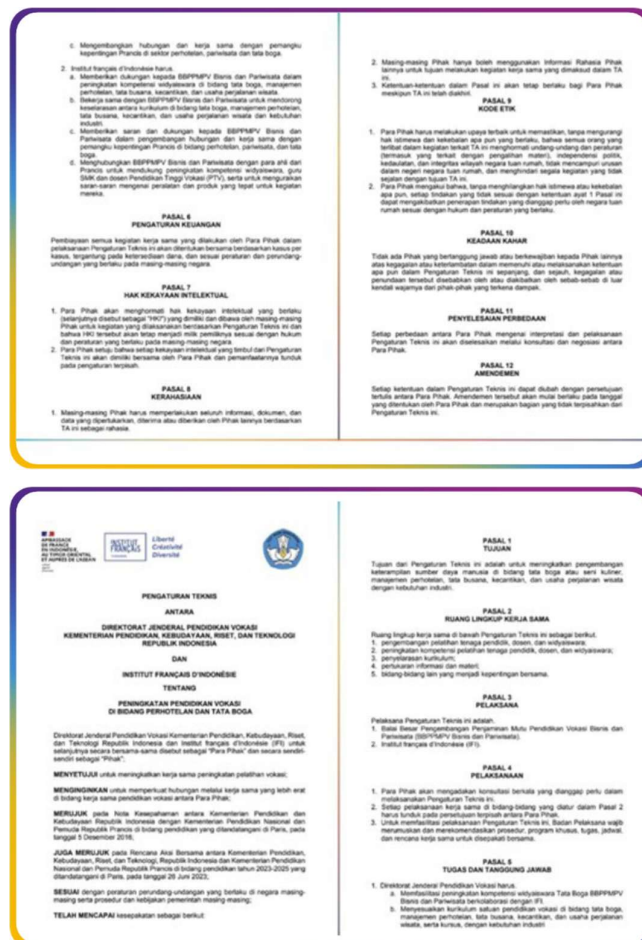


Gambar 3.66 Politeknik Negeri Batam mendapatkan Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Pelayanan Prima dari KemenPAN RB

H. Program *Crosscutting / Collaborative*

Pada tahun 2024 Ditjen Pendidikan Vokasi melakukan program *crosscutting/collaborative*, sebagai berikut:

1. Kolaborasi dengan *Institut Francais D'Indonesie* dalam Peningkatan Pendidikan Vokasi di Bidang Perhotelan dan Tata Boga. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendampingi kesuksesan partisipasi dalam *Front Row Paris* tahun 2024 guna mendapatkan eksposur pendidikan vokasi di Indonesia dalam bidang *fashion* di kancah internasional. Selain itu, kolaborasi ini merupakan tindak lanjut dari program kegiatan pengembangan kompetensi dan magang industri di CMQ *Production Culinaire Nouvelle - Aquitaine*, Perancis. Pada pelaksanaannya BBPPMPV Bidang Bisnis dan Pariwisata menginisiasi dalam mendampingi SMKN 1 Kendal, SMKN 6 Padang, dan SMKN 8 Makassar dalam kegiatan mempresentasikan dan mempromosikan *fashion* Indonesia ke tingkat dunia.





2. Kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyusun buku Profil Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan berbasis Dapodik, Susenas, Sakernas. Kolaborasi ini menghasilkan buku profil tersebut yang digunakan sebagai sumber data kebijakan.
3. Kolaborasi dengan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi salah satunya yaitu program *Matching Fund* (Dana Padanan). Kolaborasi yang dilakukan untuk program *Matching Fund* adalah Panduan Pelaksanaan *Matching Fund* bersama, yaitu untuk Satu Perguruan Tinggi dengan satu mitra DUDI, Satu Perguruan Tinggi dengan beberapa mitra DUDI, Beberapa Perguruan Tinggi dengan satu mitra DUDI, dan Beberapa Perguruan Tinggi dengan beberapa mitra DUDI. Selain itu, Platform bersama yang digunakan yaitu aplikasi Kedaireka. Platform ini bertujuan untuk membuka wadah kolaborasi agar proses inovasi, invensi, dan dapat bergerak lebih cepat ke sebuah produk yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
4. Kolaborasi dengan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi adalah penggunaan aplikasi PD Dikti, *Tracer Study* dan Sister untuk penghitungan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Vokasi yang akan bermuara ke aplikasi Sidakin sebagai Dashboard IKU Perguruan Tinggi Vokasi.
5. Kolaborasi dengan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan diantaranya penyusunan bersama instrumen evaluasi SMK proyek kreatif dan kewirausahaan dan SMK berbasis revolusi industri 4.0, pengolahan dan analisis hasil SMK proyek kreatif dan kewirausahaan dan SMK berbasis revolusi industri 4.0, rapor pendidikan, adaptasi kurikulum merdeka di SMK, perencanaan berbasis data di SMK, digitalisasi sekolah di SMK, dan kemitraan di industri dengan SMK.

BAB IV

Penutup

Selama tahun 2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut trend pencapaian indikator kinerja tahun 2022-2024 dan kinerja keuangan tahun 2020-2024.



Grafik Trend Capaian IKP Tahun 2022-2024



Grafik Trend Alokasi Anggaran Tahun 2020-2024 (Dalam Miliar)

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Alat pembelajaran yang dibutuhkan di Perguruan Tinggi Vokasi sebagian besar adalah barang import. Karena adanya pembatasan penggunaan barang impor, maka Perguruan Tinggi Vokasi perlu melakukan identifikasi lebih awal terkait untuk mencari barang substitusi yang mengandung PDN/TKDN.
2. Dalam pelaksanaan program SMK PK, perlu dilakukan kurasi melalui verifikasi dan validasi lebih mendetail terhadap komponen kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap bentuk nilai padanan yang akan diberikan oleh mitra industri, sehingga dibutuhkan waktu lebih lama pada saat proses seleksi sekolah calon penerima program bantuan.
3. Terdapat beberapa lembaga kursus dan pelatihan yang sudah ditetapkan sebagai calon penyelenggara program PKK dan PKW namun terlambat menyampaikan laporan awal sehingga menunda proses pencairan dana bantuan.
4. Pada pelaksanaan pelatihan untuk guru SMK terdapat irisan kompetensi pada peserta sehingga perlu dilakukan pemetaan ulang, dan pada pelaksanaan pelatihan untuk pengawas SMK terjadi kekurangan peserta karena untuk wilayah Papua jumlah pengawas SMK sangat sedikit dan beberapa belum dilantik.
5. Jumlah usul proposal penelitian pada program penelitian dan pengabdian masyarakat belum terlalu banyak, disebabkan pengusul membutuhkan waktu untuk melakukan koordinasi dan komunikasi mengenai riset yang akan dilakukan, serta diperlukan waktu untuk menyepakati dokumen kerjasama kegiatan antar kampus/lembaga.

Dengan berakhirnya periode Rencana Strategi (Renstra) Tahun 2020-2024, dapat dikatakan bahwa Kementerian/Eselon 1/Unit Kerja telah melaksanakan program kegiatan berdasarkan target/sasaran kinerja yang ditetapkan dengan optimal/tidak optimal. Selanjutnya, untuk memasuki periode arah dan kebijakan baru dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, RPJMN 2025. Arah kebijakan baru tersebut tentunya perlu didukung oleh program, target, sasaran kinerja dan anggaran yang memadai. Salah satu sasaran utama pembangunan pada RPJPN dan RPJMN tersebut yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, untuk mendukung sasaran utama tersebut tentu saja dibutuhkan strategi dan kebijakan di masa yang akan datang.

Berikut gambaran arah dan kebijakan pendidikan untuk periode berikutnya, khususnya terkait dengan pendidikan vokasi :

1. Memperkuat sistem penjaminan mutu dan kualitas lulusan SMK melalui peningkatan dan pemerataan SMK agar memiliki lembaga sertifikasi yang terlisensi BNSP serta pelaksanaan sertifikasi yang berafiliasi dengan dunia kerja atau asosiasi profesi.
2. Meningkatkan tata kelola dan manajemen di satuan pendidikan SMK melalui pembentukan BLUD serta stimulasi pemberdayaan sumberdaya yang ada untuk memperoleh sumber dana lainnya sehingga sekolah dapat melakukan upaya pembenahan dan pemenuhan operasional secara mandiri.
3. Koordinasi dengan organisasi mitra untuk pelaksanaan sosialisasi program kursus dan pelatihan.
4. Penyelarasan pendidikan vokasi dengan dunia kerja secara organik dilaksanakan oleh satuan pendidikan vokasi bersama dengan industri mitra untuk mengidentifikasi kompetensi, pembelajaran, dan kurikulum yang dibutuhkan oleh dunia kerja sehingga lulusan pendidikan vokasi akan selaras atau relevan dengan kebutuhan industri atau keunggulan wilayah.
5. Hasil dari inovasi pembelajaran atau *teaching factory* yang dilaksanakan di BBPPMPV/BPPMPV dimanfaatkan sebagai bahan ajar pada pelatihan selanjutnya serta digunakan sebagai output pada proses pembelajaran di sekolah.
6. Mengoptimalkan kerjasama dengan industri mulai dari penyelarasan kurikulum, magang industri, sampai dengan pendampingan pasca magang.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Perjanjian Kinerja Akhir
3. Pengukuran Kinerja
4. Surat Keterangan Telah Direviu dan Catatan Hasil Reviu



Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Dengan
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kiki Yuliati
Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Nadiem Anwar Makarim
Jabatan : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 16 Februari 2024

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi,

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Nadiem Anwar Makarim
NIP -

 Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Kiki Yuliati
NIP -



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



Sasaran (SP)	Indikator (IKP)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1] Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	[1.1] Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	17.98
[2] Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[2.1] Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	46.29
[2] Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[2.2] Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	50.37
[2] Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[2.3] Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	66.62
[2] Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[2.4] Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	62.35
[3] Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	[3.1] Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	3158
[4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[4.1] Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	A
[5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[5.1] Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	46

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp. 2.599.684.330.000,-
2.	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Rp. 1.656.828.991.000,-
3.	4264	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Rp. 99.011.217.000,-
4.	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp. 388.372.307.000,-
5.	4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Rp. 453.758.676.000,-



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

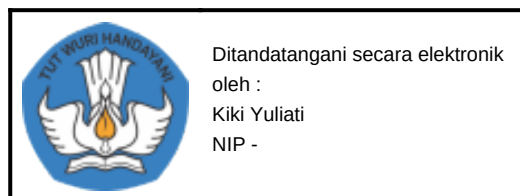
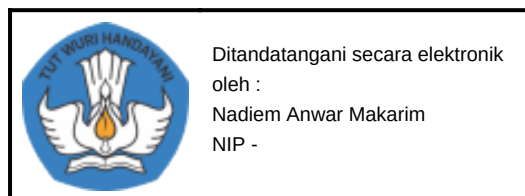


6.	4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	Rp. 2.553.979.922.000,-
7.	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp. 463.297.989.000,-
8.	6700	Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi	Rp. 274.363.263.000,-
9.	6701	Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	Rp. 124.532.043.000,-
Total Anggaran			Rp. 8.613.828.738.000,-

Jakarta, 16 Februari 2024

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi,

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé





Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
Dengan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tatang Muttaqin
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Abdul Mu'ti
Jabatan : Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,

Abdul Mu'ti

Jakarta, 25 November 2024

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,

Tatang Muttaqin

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SP 1] Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	[IKP 1.1] Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	17.98
[SP 2] Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	[IKP 2.1] Persentase lulusan SMK yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	46.29
	[IKP 2.2] Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	50.37
	[IKP 2.3] Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	66.62
	[IKP 2.4] Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	62.35
[SP 3] Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	[IKP 3.1] Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	3158
[SP 4] Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	[IKP 4.1] Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A
[SP 5] Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	[IKP 5.1] Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan Vokasi mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	46

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	4261	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Vokasi	Rp 2.599.684.330.000
2	4262	Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	Rp 1.656.828.991.000
3	4264	Pembinaan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri	Rp 99.011.217.000
4	4278	Pembinaan Kursus dan Pelatihan	Rp 388.372.307.000
5	4466	Penyediaan Dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Vokasi	Rp 453.779.751.000
6	4467	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi	Rp 2.821.816.358.000
7	4468	Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Vokasi	Rp 464.413.965.000
8	6700	Pembinaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pendidikan Tinggi Vokasi	Rp 274.363.263.000

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
9	6701	Pengembangan Kelembagaan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	Rp 152.623.637.000
Total Anggaran			Rp 8.910.893.819.000

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah,



Abdul Mu'ti

r- l

Jakarta, 25 November 2024

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,



Tatang Muttaqin

Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program		Satuan	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024	Realisasi 2024	%
1	Meningkatnya partisipasi pendidikan tinggi	1.1	Persentase peningkatan mahasiswa perguruan tinggi vokasi	%	17,98	15,68	87,21
2	Meningkatnya mutu dan relevansi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja	2.1	Persentase lulusan SMK yang bekerja / berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1x UMP	%	46,29	47,34	102,27
		2.2	Persentase lulusan Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi yang bekerja/berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan dengan gaji/pendapatan minimum sebesar 1,2x UMP	%	50,37	30,52	60,59
		2.3	Persentase lulusan kursus dan pelatihan yang memiliki pekerjaan atau berwirausaha	%	66,62	69,49	104,31
		2.4	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembelajaran berkualitas, penjaminan mutu, dan kerja sama dengan Dunia Kerja	%	62,35	63,73	102,21
3	Meningkatnya riset, inovasi dan ilmu pengetahuan dari PT Vokasi	3.1	Jumlah keluaran penelitian PT Vokasi yang diterapkan oleh masyarakat	Karya	3.158	4.257	134,80
4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	4.1	Predikat SAKIP Ditjen Pendidikan Vokasi	Predikat	A	AA	112,5
5	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	5.1	Jumlah Satker di Ditjen Pendidikan vokasi mendapatkann predikat ZI-WBK/WBBM)	Satker	46	11	23,91

**Pernyataan Telah Direviu
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi
Tahun Anggaran 2024**

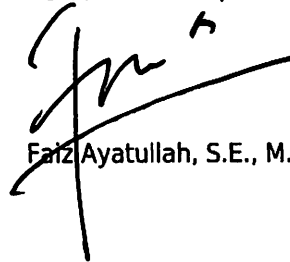
Kami telah mereviu laporan kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 4 Februari 2025

Ketua Tim Reviu,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Faiz Ayatullah, S.E., M.M.

Pernyataan		Check List
Format	1. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja	☒
	2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja	☒
	3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai	☒
	4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	☒
	5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	☒
	6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	☒
Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja	☒
	2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai	☒
	3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja	☒
	4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari setiap unit kerja	☒
	5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya	☒
Substansi	1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam perjanjian kinerja	☒
	2. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis	☒
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK dalam perjanjian kinerja	☒
	5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	☒
	6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra	☒
	7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja/ hambatan dan kendala/langkah antisipasi) pada setiap indikator kinerja	☒
	8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun berjalan	☒
	9. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran	☒
	10. IKSS/IKP/IKK telah SMART	☒

